

Sampah Menggunung Bikin Nelayan Kerang Hijau Limbung



ANGKUT: Alat berat dikerahkan untuk mengangkut tumpukan sampah dari sedimentasi di kawasan pesisir Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (4/6). Penumpukan sampah yang didominasi limbah plastik tersebut dikeluhkan nelayan karena mengganggu aktivitas melaut, menurunkan hasil tangkapan, serta berdampak pada kualitas perairan dan budidaya kerang hijau di Teluk Jakarta. (Poskota/Pandi Ramedhan)

Kerusakan Alat Berat Hambat Proses Pengangkutan

JAKARTA (Poskota) - Di antara perahu-perahu nelayan yang bersandar di pesisir Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, hamparan sampah terlihat menggunung di tepi laut. Tumpukan limbah yang terbawa arus itu menjadi pemandangan sehari-hari bagi para nelayan yang menggantung hidup dari hasil laut.

Bagi Kalil, nelayan sekaligus pembudidaya kerang hijau yang telah 39 tahun melaut, kondisi tersebut membuatnya dirinya limbung. Pasalnya kondisi itu bukan sekadar persoalan kebersihan lingkungan.

Sampah yang menumpuk di sekitar perairan budidaya dinilai telah berdampak langsung terhadap hasil tangkapan dan kualitas komoditas laut yang mereka hasilkan. "Dampaknya bagi nelayan ya penurunan, penyusutan hasil tangkapan," ujar Kalil saat ditemui di kawasan Muara Angke, Kamis (4/6).

Menurutnya, pencemaran yang terjadi di perairan sekitar lokasi budidaya menurunkan kualitas kerang hijau menurun. Kondisi itu bahkan memunculkan anggapan di masyarakat bahwa kerang hijau dari kawasan tersebut mengandung bahan berbahaya. "Kerang hijau ini akhirnya tercemar, dan kemudian pada akhirnya kerang hijau dibuang mengandung bahan kimia. Padahal ya karena pencemaran itu adanya. Kalau menilai persoalan lingkungan yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai perubahan yang terjadi di kawasan pesisir Jakarta. Ia menyortir dampak reklamasi yang menurunkan turat memengaruhi kondisi perairan dan kehidupan nelayan tradisional."

Bersambung ke Halaman 11



Dewi Perssik

Kesulitan Mata Kuliah Bahasa Inggris

PEDANGDUT sekaligus presenter Dewi Perssik tengah menjalani pendidikan strata satu (S1) di salah satu universitas di Jakarta. Penyanyi yang akrab disapa Dope itu memilih jurusan Psikologi dengan tujuan memperdalam pemahamannya terhadap perkembangan dan karakter putra semata wayangnya, Gabriel.

Meski penuh semangat menempuh pendidikan di bangku kuliah, Dewi mengakui sempat menghadapi sejumlah tantangan, terutama saat mengikuti mata kuliah yang disampaikan dalam bahasa Inggris. Ia mengaku kesulitan memahami materi yang disampaikan dosen selama perkuliahan berlangsung.

"Saya enggak tahu dosen ngomong apa. Jadi harus diterjemahkan dulu baru saya paham," ujar Dewi Perssik saat ditemui di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Kendati demikian, Dewi bersyukur mendapat dosen yang memahami keterbatasannya dalam mengikuti materi berbahasa asing. Ia memilih bersikap terbuka kepada pengajarnya mengenai kendala yang dihadapi selama proses belajar. "Alhamdulillah, dosennya bukan yang ketat banget. Aku blakblakan bilang ke beliau kalau saya enggak tahu beliau ngomong apa," katanya. (rub)



Lansia Rudapaksa Remaja 14 Tahun di Toilet Masjid



Korban Merupakan Tetangga Pelaku

SERANG (Poskota) - Seorang pria lanjut usia berinisial UM, 60 tahun, ditangkap aparat Polres Serang setelah diduga merudapaksa tetangganya yang masih berusia 14 tahun di sebuah toilet masjid di Desa Sukasari, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang.

Kapolres Serang, AKBP Andri Kurniawan menjelaskan, dugaan tindak pidana kekerasan seksual tersebut terjadi pada Jumat (15/5) malam, usai salat Isya. Korban dan pelaku diketahui tinggal berdekatan. Rumah korban berada di samping masjid, sedangkan rumah pelaku terletak tepat di seberang jalan.

Menurut Kapolres, saat kejadian korban tengah duduk seorang diri di teras rumah. Melihat korban sendirian, pelaku kemudian memanggil dan membujuknya dengan iming-iming uang sebesar Rp10.000.

"Korban yang masih di bawah umur kemudian diajak masuk ke toilet masjid oleh tersangka," kata Andri Kurniawan didampingi Kasatreskrim Polres Serang, AKP Andi Kurniadi ES, Kamis (4/6).

Di dalam toilet yang sempit dan tertutup, pelaku diduga melakukan tindakan asusila terhadap korban.

Bersambung ke Halaman 11

Saiful Mujani Datangi Polda Metro Jaya

Terkait Dugaan Penghasutan

JAKARTA (Poskota) - Peneliti politik Saiful Mujani menemui pangkalan pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan penghasutan yang dilaporkan sejumlah pihak terkait penyertaannya dalam sebuah forum publik. Pemeriksaan yang berlangsung pada Kamis (4/6) itu mendapat perhatian kalangan akademisi, aktivis, dan pegiat demokrasi karena dinilai berkaitan dengan kebebasan berpendapat serta ruang kritik di Indonesia.

Saiful tiba di Polda Metro Jaya didampingi sejumlah tokoh, di antaranya Todung Mulya Lubis, Ray Rangkuti, dan Muhammad Istur. Kepada wartawan, ia menyatakan siap memberikan klarifikasi kepada penyidik terkait perkara yang sedang ditangani.

Bersambung ke Halaman 11

80 Ribu Warga Diprediksi Padati GBK di Akhir Pekan

Rekayasa Lalu dan Transportasi Massal Disiapkan

JAKARTA (Poskota) - Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, diperkirakan akan dipadati puluhan ribu pengunjung pada akhir pekan, 6-7 Juni 2026. Berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional yang digelar secara bersamaan di kompleks olahraga terbesar di Indonesia itu diprediksi menarik sedikitnya 80.800 pengunjung selama dua hari.

Mengantisipasi lonjakan mobilitas tersebut, Dinas Perhubungan (Distub) DKI Jakarta menyiapkan sejumlah langkah pengaturan lalu lintas (lalin), rekayasa arus kendaraan, serta optimalisasi layanan transportasi umum guna menjaga kelancaran aktivitas masyarakat.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengatakan pihaknya telah menempatkan personel di sejumlah titik strategis untuk melakukan pengaturan lalu lintas, pengawasan parkir, serta berkoordinasi dengan kepolisian dan penyelenggara kegiatan.

"Kami telah menyiapkan personel untuk melakukan pengaturan lalu lintas, pengawasan parkir, serta koordinasi dengan pihak kepolisian dan penyelenggara kegiatan."

Bersambung ke Halaman 11

JADWAL SALAT				
SUBUH	ZUHUR	ASAR	MAGRIB	ISYA
04.42	12.02	15.14	18.04	19.13

TUKANG NAKAP ORANG SERONG KASI SATPOL PP MALAH DICOKOK BINI

NAH... ini dia

NAMANYA Satpol PP terkenal untuk menjaga ketertarikan Kota. Di antaranya, menggerebek pasangan selingkuh. Lha ini Kasi Satpol PP Batanghari, M Yunus, malah selingkuh dan ngamar bersama ASN Siti Rahmawati. M Yunus selingkuh dengan wanita lain yang juga PNS. Perbuatan tidak terpuji dua PNS ini dilakukan di rumah selingkuhan perempuan di Rt 07 Simpang Aro, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muarabulan Batanghari, Jambi. Silahi M Yunus yang tukang nakap orang agam serong. Lha Kasi Satpol PP ini dicokok bini.

Bersambung ke Halaman 4

Polres Kepulauan Seribu Patroli Kamtibmas

Menjaga Nadi Keamanan di Perairan Utara Jakarta

Penulis: Pandi Ramedhan

Di tengah aktivitas nelayan yang melaut dan lalu lintas kapal wisata yang menghubungkan pulau-pulau di Kepulauan Seribu terus hadir memastikan keamanan wilayah tetap terjaga. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Jaga Jakarta On The Spot Kamtibmas yang digelar di kawasan perairan Kepulauan Seribu, kemarin.

Program yang menjadi salah satu unggulan Polda Metro Jaya itu bertujuan memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kehadiran langsung personel Polri di tengah aktivitas warga.

Bersambung ke Halaman 11



PATROL: Personel Polres Kepulauan Seribu melaksanakan patroli dalam program Jaga Jakarta On The Spot Kamtibmas di wilayah perairan Kepulauan Seribu, kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan kawasan perairan, memberikan rasa aman kepada masyarakat dan wisatawan, serta mengantisipasi berbagai potensi gangguan kamtibmas. (Istimedia)



Haloo... Bang Iki

Rubrik ini menampung keluhan atau kritik warga pada pelayanan publik, fasilitas umum dan lain-lain. Kirim kritik dan keluhan anda ke

WhatsApp: 081188098706

Sekitar Stasiun Tebet Semrawut

► Di Kolong Fly Over Stasiun Tebet tepatnya dekat di Jalan Ros Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, semrawut sekali banyak pemotor lawan arus, angkot ngetem, dan PKL memakan badan jalan. (085613440XXXX)

Minta Tolong Premanisme Diberantas

► Kepada Polri tolong dong ditertibkan preman berkedok ormas yang meresahkan meminta para pelaku usaha dan menjaga iklim investasi bisnis terutama Jakarta dan Bodetabek. Trims (0853499XXXX)

PKL Remang-Remang di Waduk Kali Sunter

► Adanya pembiaran. Warung PKL remang-remang. Di waduk. Jalan Inspektori Kali Sunter. Sepanjang Waduk Plumpang menuju pasar ular. Warga minta. Walikota Jakarta Utara. Camat Satpol PP. Lurah. Untuk menertibkan. Warung remang-remang PKL yang ada di wilayah. Rawa Badak Utara. Koja, Jakut. (08559148XXXX)

Stasiun Jatinegara Marak Copet

► Tolong di tindak. Di depan Stasiun Jatinegara copet nya terang2an !!! Bolak balik ikutin pejalan kaki yg baru turun dari stasiun Jatinegara, waspada jika lewat situ tas jangan di taro di belakang. Terima kasih. (081994752XXXX)



Siempel

Presiden Prabowo mencolek Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Ketua KPK Setyo Budiyo, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin agar menyampaikan kebutuhan untuk penguatan lembaga kepada dirinya. Apa yang kau butuh, kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi.

**Kalau menangkap yang manta noh di Oslo di penuhi nggak pak?*

Jalan raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, untuk sementara ditutup, karena ada perbaikan jalan yang ambles.

**Alternatifnya masuk gang jalan warga, kalau rusak ditanggung pemkot ya.*

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyampaikan permohonan maaf setelah ungkahan peringatan Hari Lahir Pancasila di media sosial menuai kritik dari warganet.

**BRIN saja salah, terlalubinibasi kali hingga lambang negara pun salah, jangan main-mainlah.*



Poskota/istimewa



SOSOK



Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin.

Poskota/istimewa

○ Kombes Komarudin

Ajak Warga Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan

POSKOTA - Program penghapusan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor yang digulirkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendapat perhatian dari Polda Metro Jaya.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut sebagai kesempatan menyelesaikan kewajiban pajak tanpa terbebani denda yang menumpuk.

"Program pemutihan ini berlaku selama tiga bulan. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Ini diharapkan dapat membantu penertiban administrasi kendaraan bermotor," ujar Komarudin di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (3/6).

Komarudin menegaskan, layanan pembayaran pajak tetap dapat diakses di seluruh kantor Samsat yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Untuk mengantisipasi potensi lonjakan wajib pajak selama masa pemutihan, pihaknya telah menyiapkan personel serta dukungan sarana dan prasarana

pelayanan.

"Kami sudah menyiapkan personel di lapangan, termasuk fasilitas pelayanan di Samsat agar masyarakat yang datang dapat terlayani dengan baik," katanya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar melakukan pembayaran pajak secara mandiri melalui layanan resmi Samsat tanpa melalui perantara. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari potensi penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

"Kami mengimbau masyarakat datang langsung ke Samsat dan mengurus sendiri pembayaran pajak kendaraannya. Pelayanan dibuka setiap hari kerja, Senin sampai Sabtu," jelasnya.

Lebih lanjut, Komarudin berharap program ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, tidak hanya untuk meringankan beban wajib pajak, tetapi juga untuk memperbarui data administrasi kendaraan bermotor.

"Silakan manfaatkan program ini sampai 31 Agustus 2026. Ini kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pajak sekaligus menertibkan administrasi kendaraan," pungkasnya. (man)



SENTIL SENTIL

Obrolan Warteg:

Teganya, Uang Rakyat Untuk Bancakan

Dalam tiga hari terakhir ini kita merasa prihatin dengan tersangkanya sejumlah pejabat tinggi negara dalam dugaan tindak pidana korupsi.

Diberitakan, pada Rabu sore, 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana beserta dua mantan wakil kepala BGN, Lodewyk Pusing dan Sony Sonjaya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada BGN tahun 2025 - 2026.

Esok harinya, Kamis pagi, 4 Juni 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasaran (Impias), Silmy Karim, tersangka dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Selain Wamen, terdapat juga tiga pejabat di jajaran Ditjen Imigrasi, yang terlihat mengenakan rompi tahanan KPK.

"Jadulnya korupsi lagi, korupsi lagi. Kini diduga dilakukan pejabat tinggi negeri," ujar bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.

"Kalau sudah pejabat tinggi memang banyak godaan...," sambung Yudi.

"Ya, karena dengan jabatan yang dimilikinya, melekat pula kekuasaan dan kewenangan dalam mengambil kebijakan, termasuk penggunaan anggaran. Nah, dalam penggunaan anggaran ini godaan sangat kencang, baik melalui fee, komisi maupun mark up harga," jelas mas Bro.

"Kalau nggak kuat dan teguh hati ada godaan yang datang silih berganti, bisa terjerumus ke jurang, akhirnya tumbang," kata Yudi.

"Ibarat pohon, kian menjulang akan semakin

menerima banyak hempasan angin kencang. Itu dari luar, belum terpaan angin dari dalam. Selain harus memperkuat akarnya, juga batang dan cabang-cabangnya...," jelas Heri.

"Ya, karena dengan jabatan yang dimilikinya, melekat pula kekuasaan dan kewenangan dalam mengambil kebijakan, termasuk penggunaan anggaran. Nah, dalam penggunaan anggaran ini godaan sangat kencang, baik melalui fee, komisi maupun mark up harga," jelas mas Bro.

"Setuju Bro, Yang di atas seharusnya pula mencladani pemberantasan korupsi, bukan mencladani korupsi, terlebih yang dikorupsi uang rakyat" ujar Heri.

"Rakyat tertib dan patuh bayar pajak, karena sadar betul uang tersebut akan dikembalikan untuk menyejahterakan rakyat, memajukan bangsa dan

negara. Teganya kalau uang rakyat dikorupsi, apalagi jika sampai jadi bancakan," kata mas Bro.

"Bukan hanya tega, tapi terlalu. Itu yang membuat pemirsa merasa prihatin. Bagaimana tidak, Presiden Prabowo seperti dikatakan Men-sesneg Prasetyo Hadi, tidak bosan - bosan dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan kita semua untuk membenahi diri dan melawan praktik-praktik korupsi dalam menjalankan tugas sehari-hari," kata Heri.

"Tentu tidak terhenyi kepada rasa prihatin, pasti ada tindak lanjut untuk mencegah korupsi," ujar Yudi. (Joko Lestari)





Penanganan - Gubernur Jakarta Pramono Anung saat memberikan pernyataan kepada awak media usai penandatanganan kesepakatan lintas instansi dalam Program Percontohan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Jakarta Jadi Contoh Nasional Penanganan Kasus Perempuan dan Anak

JAKARTA (Poskota) -

Pemprov Jakarta resmi menjadi daerah percontohan dalam Program Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak. Kesepakatan lintas instansi tersebut ditandatangani di Ruang Pola Benyamin Sueb, Graha Ali Sadikin, Balai Kota Jakarta, Kamis (4/6).

Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Jakarta sebagai wilayah percontohan program tersebut. Ia menegaskan, pelaksanaan program harus berjalan optimal, terutama dalam penanganan awal kasus yang diangkatkan dapat dilakukan maksimal 24 jam sejak laporan diterima.

"Yang tidak kalah penting adalah integrasi layanan secara menyeluruh agar pelayanan berjalan utuh, didukung digitalisasi sistem, serta keberlanjutan pelayanan bagi korban yang membutuhkan," ujar Pramono.

la menilai, program ini relevan dengan kondisi Jakarta yang masih menghadapi tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3A) DKI Jakarta melalui Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak, tercatat 2.041 korban pada 2024, meningkat menjadi 2.269 korban pada 2025. Hingga 1 Juni 2026, jumlah korban tercatat sekitar 990 orang.

Pramono menjelaskan, layanan terpadu ini akan memastikan setiap korban mendapatkan akses penanganan sesuai kebutuhan, mulai dari pengaduan, perlindungan, hingga pemulihan sosial.

"Digitalisasi data juga akan diperkuat agar koordinasi lintas sektor berjalan lebih efektif," katanya. Ia berharap Jakarta dapat menjadi role model nasional dalam penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak yang

lebih cepat, terintegrasi, dan berkeadilan. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengatakan Jakarta dipilih karena memiliki kesiapan fasilitas dan kelayakan yang dinilai paling memadai dibanding daerah lain.

"Jakarta memiliki layanan kesehatan, layanan hukum, dan layanan psikososial yang relatif lengkap," ujarnya. Program ini melibatkan Kementerian PPPA, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kepolisian RI, serta LPSK.

Saat ini, Jakarta telah memiliki berbagai kanal pengaduan seperti Hotline 24 Jam PPPA, Call Center 112, 44 Pos SAPA di RPTRA, serta situs PUSPA sebagai bentuk layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang

Galon Jadi Andalan Warga Palmerah Tampung Air

○ PAM Jaya Stop Sementara Pasokan

JAKARTA (Poskota) -

Warga Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, mulai bersiap menghadapi penghentian sementara pasokan air bersih dari PAM Jaya yang dijadwalkan terjadi pada Jumat (5/6) malam.

Penghentian layanan air tersebut akan berlangsung mulai pukul 23.00 WIB hingga Sabtu (6/6/2026) dini hari, seiring adanya pemeliharaan gardu listrik milik PLN yang berdampak pada operasional Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pejompongjan I.

Sejumlah warga mengaku telah melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi terganggunya pasokan air selama beberapa jam tersebut.

Salah satunya Yusuf (50), warga setempat, yang menyiapkan sejumlah galon untuk menampung air di rumahnya karena tidak memiliki tandem air. "Soalnya kita enggak pakai toren ya, kalau galonnya kosong, ya kita siapin lagi," ujar Yusuf, Kamis (4/6).

Ia menyebut telah menyiapkan sekitar enam galon berisi air bersih sebagai cadangan kebutuhan mandi dan aktivitas rumah tangga. Jika dirasa tidak mencukupi, ia berencana menambah stok air.

"Kalau enggak cukup ya beli lagi, paling dua galon lagi. Mau enggak mau, gimana lagi," katanya. Sementara itu, warga lainnya, Murtini (48), mengaku



Antisipasi - Warga Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat, bersiap menghadapi penghentian sementara pasokan air PAM Jaya yang akan berlangsung pada Jumat (5/6/2026) malam.

lebih tenang karena memiliki tandem air berkapasitas 1.000 liter di rumahnya. Ia sudah mengisi penuh toren tersebut setelah mendapat informasi pemadaman melalui pesan berantai dan pengumuman lingkungan.

Meski demikian, ia tetap khawatir pasokan air yang ada tidak mencukupi, terutama untuk kebutuhan sehari-hari dan aktivitas renovasi rumahnya yang sempat terdampak kebakaran.

"Makanya kemarin sudah pada siap-siap ngisi galon. Saya punya toren satu ini sudah saya penuh juga," ujarnya.

Untuk sementara, sebagian pekerjaan rumah tangga seperti mencuci akan dialihkan ke jasa laundry. "Kalau cucian masih bisa diatasi. Terutama untuk mandi dan kebutuhan sehari-hari," ucapnya.

Sebelumnya, PAM Jaya mengumumkan penghentian sementara pasokan air di 45 kelurahan di Jakarta mulai Jumat (5/6) pukul 23.00 WIB hingga Sabtu (6/6/2026) pukul 01.00 WIB. Proses normalisasi distribusi diperkirakan berlangsung bertahap hingga sekitar pukul 03.00 WIB.

Direktur Teknik PAM Jaya, Akhmad Santika, menjelaskan pemeliharaan dilakukan setelah ditemukan indikasi gangguan pada gardu SN45 milik PLN saat inspeksi rutin. "Dikhawatirkan akan terjadi dampak yang lebih parah lagi sehingga dapat menyertop suplai listrik ke IPA Pejompongjan I," kata Santika.

Ia menambahkan, pemeliharaan distribusi air akan dilakukan bertahap dengan mengoperasikan beberapa instalasi secara maksimal untuk mempercepat normalisasi layanan kepada pelanggan. (pan)

Jaya, Akhmad Santika, menjelaskan pemeliharaan dilakukan setelah ditemukan indikasi gangguan pada gardu SN45 milik PLN saat inspeksi rutin. "Dikhawatirkan akan terjadi dampak yang lebih parah lagi sehingga dapat menyertop suplai listrik ke IPA Pejompongjan I," kata Santika.

Ia menambahkan, pemeliharaan distribusi air akan dilakukan bertahap dengan mengoperasikan beberapa instalasi secara maksimal untuk mempercepat normalisasi layanan kepada pelanggan. (pan)

Jaya, Akhmad Santika, menjelaskan pemeliharaan dilakukan setelah ditemukan indikasi gangguan pada gardu SN45 milik PLN saat inspeksi rutin. "Dikhawatirkan akan terjadi dampak yang lebih parah lagi sehingga dapat menyertop suplai listrik ke IPA Pejompongjan I," kata Santika.

Ia menambahkan, pemeliharaan distribusi air akan dilakukan bertahap dengan mengoperasikan beberapa instalasi secara maksimal untuk mempercepat normalisasi layanan kepada pelanggan. (pan)

Jaya, Akhmad Santika, menjelaskan pemeliharaan dilakukan setelah ditemukan indikasi gangguan pada gardu SN45 milik PLN saat inspeksi rutin. "Dikhawatirkan akan terjadi dampak yang lebih parah lagi sehingga dapat menyertop suplai listrik ke IPA Pejompongjan I," kata Santika.

Ia menambahkan, pemeliharaan distribusi air akan dilakukan bertahap dengan mengoperasikan beberapa instalasi secara maksimal untuk mempercepat normalisasi layanan kepada pelanggan. (pan)

Jaya, Akhmad Santika, menjelaskan pemeliharaan dilakukan setelah ditemukan indikasi gangguan pada gardu SN45 milik PLN saat inspeksi rutin. "Dikhawatirkan akan terjadi dampak yang lebih parah lagi sehingga dapat menyertop suplai listrik ke IPA Pejompongjan I," kata Santika.

Ia menambahkan, pemeliharaan distribusi air akan dilakukan bertahap dengan mengoperasikan beberapa instalasi secara maksimal untuk mempercepat normalisasi layanan kepada pelanggan. (pan)

Jaya, Akhmad Santika, menjelaskan pemeliharaan dilakukan setelah ditemukan indikasi gangguan pada gardu SN45 milik PLN saat inspeksi rutin. "Dikhawatirkan akan terjadi dampak yang lebih parah lagi sehingga dapat menyertop suplai listrik ke IPA Pejompongjan I," kata Santika.

Ia menambahkan, pemeliharaan distribusi air akan dilakukan bertahap dengan mengoperasikan beberapa instalasi secara maksimal untuk mempercepat normalisasi layanan kepada pelanggan. (pan)

lebih tenang karena memiliki tandem air berkapasitas 1.000 liter di rumahnya. Ia sudah mengisi penuh toren tersebut setelah mendapat informasi pemadaman melalui pesan berantai dan pengumuman lingkungan.

Meski demikian, ia tetap khawatir pasokan air yang ada tidak mencukupi, terutama untuk kebutuhan sehari-hari dan aktivitas renovasi rumahnya yang sempat terdampak kebakaran.

"Makanya kemarin sudah pada siap-siap ngisi galon. Saya punya toren satu ini sudah saya penuh juga," ujarnya.

Untuk sementara, sebagian pekerjaan rumah tangga seperti mencuci akan dialihkan ke jasa laundry. "Kalau cucian masih bisa diatasi. Terutama untuk mandi dan kebutuhan sehari-hari," ucapnya.

Sebelumnya, PAM Jaya mengumumkan penghentian sementara pasokan air di 45 kelurahan di Jakarta mulai Jumat (5/6) pukul 23.00 WIB hingga Sabtu (6/6/2026) pukul 01.00 WIB. Proses normalisasi distribusi diperkirakan berlangsung bertahap hingga sekitar pukul 03.00 WIB.

Direktur Teknik PAM Jaya, Akhmad Santika, menjelaskan pemeliharaan dilakukan setelah ditemukan indikasi gangguan pada gardu SN45 milik PLN saat inspeksi rutin. "Dikhawatirkan akan terjadi dampak yang lebih parah lagi sehingga dapat menyertop suplai listrik ke IPA Pejompongjan I," kata Santika.

Ia menambahkan, pemeliharaan distribusi air akan dilakukan bertahap dengan mengoperasikan beberapa instalasi secara maksimal untuk mempercepat normalisasi layanan kepada pelanggan. (pan)

Jaya, Akhmad Santika, menjelaskan pemeliharaan dilakukan setelah ditemukan indikasi gangguan pada gardu SN45 milik PLN saat inspeksi rutin. "Dikhawatirkan akan terjadi dampak yang lebih parah lagi sehingga dapat menyertop suplai listrik ke IPA Pejompongjan I," kata Santika.

Ia menambahkan, pemeliharaan distribusi air akan dilakukan bertahap dengan mengoperasikan beberapa instalasi secara maksimal untuk mempercepat normalisasi layanan kepada pelanggan. (pan)

Jaya, Akhmad Santika, menjelaskan pemeliharaan dilakukan setelah ditemukan indikasi gangguan pada gardu SN45 milik PLN saat inspeksi rutin. "Dikhawatirkan akan terjadi dampak yang lebih parah lagi sehingga dapat menyertop suplai listrik ke IPA Pejompongjan I," kata Santika.

Ia menambahkan, pemeliharaan distribusi air akan dilakukan bertahap dengan mengoperasikan beberapa instalasi secara maksimal untuk mempercepat normalisasi layanan kepada pelanggan. (pan)

Jaya, Akhmad Santika, menjelaskan pemeliharaan dilakukan setelah ditemukan indikasi gangguan pada gardu SN45 milik PLN saat inspeksi rutin. "Dikhawatirkan akan terjadi dampak yang lebih parah lagi sehingga dapat menyertop suplai listrik ke IPA Pejompongjan I," kata Santika.

Ia menambahkan, pemeliharaan distribusi air akan dilakukan bertahap dengan mengoperasikan beberapa instalasi secara maksimal untuk mempercepat normalisasi layanan kepada pelanggan. (pan)

Jaya, Akhmad Santika, menjelaskan pemeliharaan dilakukan setelah ditemukan indikasi gangguan pada gardu SN45 milik PLN saat inspeksi rutin. "Dikhawatirkan akan terjadi dampak yang lebih parah lagi sehingga dapat menyertop suplai listrik ke IPA Pejompongjan I," kata Santika.

Ia menambahkan, pemeliharaan distribusi air akan dilakukan bertahap dengan mengoperasikan beberapa instalasi secara maksimal untuk mempercepat normalisasi layanan kepada pelanggan. (pan)

Jaya, Akhmad Santika, menjelaskan pemeliharaan dilakukan setelah ditemukan indikasi gangguan pada gardu SN45 milik PLN saat inspeksi rutin. "Dikhawatirkan akan terjadi dampak yang lebih parah lagi sehingga dapat menyertop suplai listrik ke IPA Pejompongjan I," kata Santika.

Ia menambahkan, pemeliharaan distribusi air akan dilakukan bertahap dengan mengoperasikan beberapa instalasi secara maksimal untuk mempercepat normalisasi layanan kepada pelanggan. (pan)



Job Fair - Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Sudin Nakertrans) menggelar Job Fair Tahap 1 Tahun 2026 di GOR Senen.

Job Fair Jakpus Sediakan 2.000 Lowongan Kerja

JAKARTA (Poskota) - Pemerintah Kota Jakarta Pusat melalui Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Sudin Nakertrans) menggelar Job Fair Tahap 1 Tahun 2026 di GOR Senen selama dua hari, Kamis-Jumat (4-5 Juni 2026). Kegiatan ini menyediakan sekitar 2.000 lowongan pekerjaan dari 37 perusahaan.

Salah bursa kerja, kegiatan juga menghadirkan layanan walk in interview untuk mempercepat proses rekrutmen para pencari kerja, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Sekretaris Dinas Nakertransi DKI Jakarta, Dani Sudrajat, mengatakan job fair ini menjadi sarana mempertemukan

langsung pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. "Dalam kesempatan ini ada sekitar 2.000 lowongan serta diikuti sekitar 37 perusahaan. Kegiatan ini juga dilakukan walk in interview, termasuk bagi sahabat disabilitas," ujar Dani.

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mengembangkan konsep job fair agar tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi juga lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain perusahaan, kegiatan ini juga melibatkan pelaku UMKM binaan sebagai upaya mendorong tumbuhnya wirausaha baru di Jakarta. "Kami berupaya tidak hanya mempertemukan

pencari kerja dengan perusahaan, tetapi juga memberdayakan UMKM binaan," katanya.

Dani berharap kehadiran UMKM dapat membuka peluang masyarakat untuk menjadi pelaku usaha mandiri, sehingga menciptakan lapangan kerja tidak hanya bergantung pada perusahaan. (den)

Berdasarkan data tahun sebelumnya, sekitar 8.000 pencari kerja mengikuti job fair Pemprov DKI Jakarta, dan 460 di antaranya berhasil diterima bekerja. Meski demikian, pemerintah terus mendorong peningkatan serapan tenaga kerja melalui kolaborasi dengan berbagai perusahaan. (den)

1.337 Pelanggaran Lalu Lintas Terjaring di Jaksel



Tertib - Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Selatan saat melakukan penindakan parkir liar.

JAKARTA (Poskota) -

Sudinhub Jakarta Selatan menindak sebanyak 1.337 kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas selama periode Januari hingga Mei 2026. Penindakan dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban lalu lintas sekaligus meningkatkan keamanan masyarakat.

Kepala Sudinhub Jakarta Selatan, Bernad Octavianus Pasaribu, mengatakan pelanggaran yang ditindak meliputi

parkir liar, kelayakan kendaraan umum, pelanggaran rambu, hingga berbagai pelanggaran lalu lintas lainnya.

"Penindakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban lalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran," ujar Bernad, Rabu (3/6).

Ia merinci, penindakan

terbanyak dilakukan melalui pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan total 547 kasus. Selain itu, terdapat 379 pelanggaran angkutan umum, 205 operasi cepat bentil (OCP) sepeda motor, 146 derek surat peringatan (SP), 32 OCP mobil, 21 derek BAP Disub, serta 7 OCP Bajaj.

Bernad menyebut, April menjadi bulan dengan jumlah pelanggaran tertinggi, yakni

425 kasus. Disusul Januari sebanyak 275 kasus, Februari 282 kasus, Maret 124 kasus, dan Mei 231 kasus.

Menurutnya, dalam pelaksanaan penindakan, Sudinhub Jakarta Selatan turut berkolaborasi dengan unsur TNI dan Polri untuk mendukung efektivitas di lapangan. "Dalam penindakan, kami juga melibatkan unsur TNI dan Polri. Untuk BAP, sebagian dilakukan oleh Polri sesuai ketentuan," jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan di titik-titik rawan pelanggaran, termasuk kawasan padat kendaraan dan lokasi parkir liar. "Kami akan terus meningkatkan pengawasan di sejumlah titik rawan pelanggaran lalu lintas," ujarnya.

Bernad juga mengimbau masyarakat agar lebih tertib dalam berlalu lintas demi keselamatan dan kenyamanan bersama, terutama dalam penggunaan fasilitas umum. "Semoga penindakan ini memberikan efek jera agar Jakarta Selatan semakin tertib, rapi, dan nyaman," pungkasnya. (cr-4)

2.516 Hewan di Jakarta Utara

Telah Divaksin Rabies

JAKARTA (Poskota) - Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Utara telah melakukan vaksinasi terhadap 2.516 Hewan Pemulsa Rabies (HPR) selama periode Januari hingga Mei 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya menjaga Jakarta tetap bebas rabies.

Kepala Suku KPKP Jakarta Utara, Novy Christine Polti, mengatakan layanan vaksinasi rabies gratis terus digencarkan melalui program jemput bola yang dilaksanakan setiap pekan di 31 kelurahan.

"Kami terus menggen-

carkan layanan vaksinasi rabies gratis melalui program jemput bola di 31 kelurahan se-Jakarta Utara untuk memudahkan akses masyarakat," ujar Novy, Kamis (4/6).

Ia merinci, hewan yang telah divaksin terdiri dari 713 ekor anjing, 1.780 kucing, 17 kera, dan 7 musang. Seluruh hewan yang divaksin telah melalui pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan.

Novy menyebut, capaian tersebut telah mencapai sekitar 40 persen dari target tahunan sebanyak 6.300 ekor HPR.

Selain itu, layanan vaksinasi rabies gratis akan kembali digelar pada Juni 2026 di Kelurahan Sungai Bambu dan Laga. Informasi jadwal dan lokasi layanan juga dapat diakses melalui akun resmi Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Utara.

Ia mengimbau masyarakat untuk rutin melakukan vaksinasi rabies terhadap hewan peliharaan setiap tahun guna mencegah penyebaran penyakit tersebut di lingkungan pemukiman.

"Kami berharap kesadaran masyarakat untuk memvaksinasi hewan peliharaannya terus meningkat," katanya. (cr-4)

DPRD Nilai Perlengkapan Relawan Bencana Masih Kurang

JAKARTA (Poskota) - Komisi ADPRD DKI Jakarta mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta untuk memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan relawan kebencanaan di tingkat wilayah, terutama di kawasan rawan bencana.

Anggota Komisi ADPRD DKI Jakarta, Dadiyono, memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam membantu masyarakat saat terjadi kondisi darurat di lapangan.

"Relawan kerap menjadi unsur terdepan membantu masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki risiko bencana yang berasal dari unsur masyarakat, seperti Karang Taruna dan komunitas warga, mendapatkan

perlengkapan yang layak agar dapat bergerak cepat sebelum bantuan resmi tiba di lokasi bencana.

Ia berharap kebutuhan tersebut dapat masuk dalam perencanaan program ke depan sehingga pelaksanaan tugas relawan di lapangan dapat berjalan lebih aman dan optimal.

"Dengan begitu, relawan dapat bekerja lebih aman saat terjadi bencana," ujarnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data BPBD DKI Jakarta, sebanyak 3.000 jaket pelampung telah didistribusikan ke kelurahan rawan banjir. Namun, bantuan seperti itu bagi relawan belum masuk dalam anggaran tahun 2025 dan akan menjadi catatan untuk perencanaan berikutnya. (cr-4)

Menurutnya, BPBD DKI Jakarta perlu memastikan relawan yang berasal dari unsur masyarakat, seperti Karang Taruna dan komunitas warga, mendapatkan

perlengkapan yang layak agar dapat bergerak cepat sebelum bantuan resmi tiba di lokasi bencana.

Ia berharap kebutuhan tersebut dapat masuk dalam perencanaan program ke depan sehingga pelaksanaan tugas relawan di lapangan dapat berjalan lebih aman dan optimal.

"Dengan begitu, relawan dapat bekerja lebih aman saat terjadi bencana," ujarnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data BPBD DKI Jakarta, sebanyak 3.000 jaket pelampung telah didistribusikan ke kelurahan rawan banjir. Namun, bantuan seperti itu bagi relawan belum masuk dalam anggaran tahun 2025 dan akan menjadi catatan untuk perencanaan berikutnya. (cr-4)

Menurutnya, BPBD DKI Jakarta perlu memastikan relawan yang berasal dari unsur masyarakat, seperti Karang Taruna dan komunitas warga, mendapatkan

perlengkapan yang layak agar dapat bergerak cepat sebelum bantuan resmi tiba di lokasi bencana.

Ia berharap kebutuhan tersebut dapat masuk dalam perencanaan program ke depan sehingga pelaksanaan tugas relawan di lapangan dapat berjalan lebih aman dan optimal.

"Dengan begitu, relawan dapat bekerja lebih aman saat terjadi bencana," ujarnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data BPBD DKI Jakarta, sebanyak 3.000 jaket pelampung telah didistribusikan ke kelurahan rawan banjir. Namun, bantuan seperti itu bagi relawan belum masuk dalam anggaran tahun 2025 dan akan menjadi catatan untuk perencanaan berikutnya. (cr-4)

2.516 Hewan di Jakarta Utara

Telah Divaksin Rabies

JAKARTA (Poskota) - Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Utara telah melakukan vaksinasi terhadap 2.516 Hewan Pemulsa Rabies (HPR) selama periode Januari hingga Mei 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya menjaga Jakarta tetap bebas rabies.

Kepala Suku KPKP Jakarta Utara, Novy Christine Polti, mengatakan layanan vaksinasi rabies gratis terus digencarkan melalui program jemput bola yang dilaksanakan setiap pekan di 31 kelurahan.

"Kami terus menggen-

carkan layanan vaksinasi rabies gratis melalui program jemput bola di 31 kelurahan se-Jakarta Utara untuk memudahkan akses masyarakat," ujar Novy, Kamis (4/6).

Ia merinci, hewan yang telah divaksin terdiri dari 713 ekor anjing, 1.780 kucing, 17 kera, dan 7 musang. Seluruh hewan yang divaksin telah melalui pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan.

Novy menyebut, capaian tersebut telah mencapai sekitar 40 persen dari target tahunan sebanyak 6.300 ekor HPR.

Selain itu, layanan vaksinasi rabies gratis akan kembali digelar pada Juni 2026 di Kelurahan Sungai Bambu dan Laga. Informasi jadwal dan lokasi layanan juga dapat diakses melalui akun resmi Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Utara.

Ia mengimbau masyarakat untuk rutin melakukan vaksinasi rabies terhadap hewan peliharaan setiap tahun guna mencegah penyebaran penyakit tersebut di lingkungan pemukiman.

"Kami berharap kesadaran masyarakat untuk memvaksinasi hewan peliharaannya terus meningkat," katanya. (cr-4)

Menurutnya, BPBD DKI Jakarta perlu memastikan relawan yang berasal dari unsur masyarakat, seperti Karang Taruna dan komunitas warga, mendapatkan

perlengkapan yang layak agar dapat bergerak cepat sebelum bantuan resmi tiba di lokasi bencana.

Ia berharap kebutuhan tersebut dapat masuk dalam perencanaan program ke depan sehingga pelaksanaan tugas relawan di lapangan dapat berjalan lebih aman dan optimal.

"Dengan begitu, relawan dapat bekerja lebih aman saat terjadi bencana," ujarnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data BPBD DKI Jakarta, sebanyak 3.000 jaket pelampung telah didistribusikan ke kelurahan rawan banjir. Namun, bantuan seperti itu bagi relawan belum masuk dalam anggaran tahun 2025 dan akan menjadi catatan untuk perencanaan berikutnya. (cr-4)

Menurutnya, BPBD DKI Jakarta perlu memastikan relawan yang berasal dari unsur masyarakat, seperti Karang Taruna dan komunitas warga, mendapatkan

perlengkapan yang layak agar dapat bergerak cepat sebelum bantuan resmi tiba di lokasi bencana.

Ia berharap kebutuhan tersebut dapat masuk dalam perencanaan program ke depan sehingga pelaksanaan tugas relawan di lapangan dapat berjalan lebih aman dan optimal.

"Dengan begitu, relawan dapat bekerja lebih aman saat terjadi bencana," ujarnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data BPBD DKI Jakarta, sebanyak 3.000 jaket pelampung telah didistribusikan ke kelurahan rawan banjir. Namun, bantuan seperti itu bagi relawan belum masuk dalam anggaran tahun 2025 dan akan menjadi catatan untuk perencanaan berikutnya. (cr-4)

Menurutnya, BPBD DKI Jakarta perlu memastikan relawan yang berasal dari unsur masyarakat, seperti Karang Taruna dan komunitas warga, mendapatkan

perlengkapan yang layak agar dapat bergerak cepat sebelum bantuan resmi tiba di lokasi bencana.

Ia berharap kebutuhan tersebut dapat masuk dalam perencanaan program ke depan sehingga pelaksanaan tugas relawan di lapangan dapat berjalan lebih aman dan optimal.

"Dengan begitu, relawan dapat bekerja lebih aman saat terjadi bencana," ujarnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data BPBD DKI Jakarta, sebanyak 3.000 jaket pelampung telah didistribusikan ke kelurahan rawan banjir. Namun, bantuan seperti itu bagi relawan belum masuk dalam anggaran tahun 2025 dan akan menjadi catatan untuk perencanaan berikutnya. (cr-4)

Menurutnya, BPBD DKI Jakarta perlu memastikan relawan yang berasal dari unsur masyarakat, seperti Karang Taruna dan komunitas warga, mendapatkan

perlengkapan yang layak agar dapat bergerak cepat sebelum bantuan resmi tiba di lokasi bencana.

Ia berharap kebutuhan tersebut dapat masuk dalam perencanaan program ke depan sehingga pelaksanaan tugas relawan di lapangan dapat berjalan lebih aman dan optimal.

"Dengan begitu, relawan dapat bekerja lebih aman saat terjadi bencana," ujarnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data BPBD DKI Jakarta, sebanyak 3.000 jaket pelampung telah didistribusikan ke kelurahan rawan banjir. Namun, bantuan seperti itu bagi relawan belum masuk dalam anggaran tahun 2025 dan akan menjadi catatan untuk perencanaan berikutnya. (cr-4)

Menurutnya, BPBD DKI Jakarta perlu memastikan relawan yang berasal dari unsur masyarakat, seperti Karang Taruna dan komunitas warga, mendapatkan

perlengkapan yang layak agar dapat bergerak cepat sebelum bantuan resmi tiba di lokasi bencana.

Ia berharap kebutuhan tersebut dapat masuk dalam perencanaan program ke depan sehingga pelaksanaan tugas relawan di lapangan dapat berjalan lebih aman dan optimal.

"Dengan begitu, relawan dapat bekerja lebih aman saat terjadi bencana," ujarnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data BPBD DKI Jakarta, sebanyak 3.000 jaket pelampung telah didistribusikan ke kelurahan rawan banjir. Namun, bantuan seperti itu bagi relawan belum masuk dalam anggaran tahun 2025 dan akan menjadi catatan untuk perencanaan berikutnya. (cr-4)

Menurutnya, BPBD DKI Jakarta perlu memastikan relawan yang berasal dari unsur masyarakat, seperti Karang Taruna dan komunitas warga, mendapatkan

perlengkapan yang layak agar dapat bergerak cepat sebelum bantuan resmi tiba di lokasi bencana.

Ia berharap kebutuhan tersebut dapat masuk dalam perencanaan program ke depan sehingga pelaksanaan tugas relawan di lapangan dapat berjalan lebih aman dan optimal.

"Dengan begitu, relawan dapat bekerja lebih aman saat terjadi bencana," ujarnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data BPBD DKI Jakarta, sebanyak 3.000 jaket pelampung telah didistribusikan ke kelurahan rawan banjir. Namun, bantuan seperti itu bagi relawan belum masuk dalam anggaran tahun 2025 dan akan menjadi catatan untuk perencanaan berikutnya. (cr-4)

Menurutnya, BPBD DKI Jakarta perlu memastikan relawan yang berasal dari unsur masyarakat, seperti Karang Taruna dan komunitas warga, mendapatkan

perlengkapan yang layak agar dapat bergerak cepat sebelum bantuan resmi tiba di lokasi bencana.

Ia berharap kebutuhan tersebut dapat masuk dalam perencanaan program ke depan sehingga pelaksanaan tugas relawan di lapangan dapat berjalan lebih aman dan optimal.

"Dengan begitu, relawan dapat bekerja lebih aman saat terjadi bencana," ujarnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data BPBD DKI Jakarta, sebanyak 3.000 jaket pelampung telah didistribusikan ke kelurahan rawan banjir. Namun, bantuan seperti itu bagi relawan belum masuk dalam anggaran tahun 2025 dan akan menjadi catatan untuk perencanaan berikutnya. (cr-4)

Menurutnya, BPBD DKI Jakarta perlu memastikan relawan yang berasal dari unsur masyarakat, seperti Karang Taruna dan komunitas warga, mendapatkan

perlengkapan yang layak agar dapat bergerak cepat sebelum bantuan resmi tiba di lokasi bencana.

Ia berharap kebutuhan tersebut dapat masuk dalam perencanaan program ke depan sehingga pelaksanaan tugas relawan di lapangan dapat berjalan lebih aman dan optimal.

"Dengan begitu, relawan dapat bekerja lebih aman saat terjadi bencana," ujarnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data BPBD DKI Jakarta, sebanyak 3.000 jaket pelampung telah didistribusikan ke kelurahan rawan banjir. Namun, bantuan seperti itu bagi relawan belum masuk dalam anggaran tahun 2025 dan akan menjadi catatan untuk perencanaan berikutnya. (cr-4)

Menurutnya, BPBD DKI Jakarta perlu memastikan relawan yang berasal dari unsur masyarakat, seperti Karang Taruna dan komunitas warga, mendapatkan

perlengkapan yang layak agar dapat bergerak cepat sebelum bantuan resmi tiba di lokasi bencana.

Ia berharap kebutuhan tersebut dapat masuk dalam perencanaan program ke depan sehingga pelaksanaan tugas relawan di lapangan dapat berjalan lebih aman dan optimal.

"Dengan begitu, relawan dapat bekerja lebih aman saat terjadi bencana," ujarnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data BPBD DKI Jakarta, sebanyak 3.000 jaket pelampung telah didistribus

Truk Proyek Balai Patriot Ambles Ganggu Akses Lalin

BEKASI (Poskota) – Proyek pembangunan Gedung Balai Patriot di kompleks Kantor Pemerintah Kota Bekasi kembali menuai sorotan setelah sebuah truk kontainer bertonase besar yang mengangkut mesin pemangku bumi mengalami insiden ambles di Jalan Rawa Tembaga 1, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kamis (4/6).

Peristiwa tersebut menyebabkan sebagian badan kendaraan menutup akses jalan dan mengganggu arus lalu lintas di kawasan yang menjadi jalur vital pelayanan publik itu.

Seorang warga setempat, Agus, mengatakan insiden itu sudah terjadi sejak Rabu (3/6/2026) malam. Namun hingga Kamis siang, kendaraan berat tersebut belum juga dievakuasi dari lokasi.

"Kejadian dari semalam. Sampai sekarang belum ada penanganan dan masih menutup sebagian jalan," ujar Agus saat ditemui di lokasi kejadian.

Agus pun mendesak Dinas Perhubungan bersama pihak pelaksana proyek segera melakukan evakuasi menggunakan alat berat seperti mobil

derek (crane) agar akses jalan dapat kembali normal.

Jalan Rawa Tembaga 1 sendiri diketahui merupakan jalur penghubung utama menuju sejumlah fasilitas penting, seperti Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Pengadilan Agama, serta berbagai instansi pelayanan publik lainnya.

Hingga pukul 11.00 WIB, truk kontainer tersebut masih terpantau berada di lokasi tanpa adanya upaya evakuasi signifikan dari pihak pengawas proyek maupun dinas terkait. Sementara itu, sejumlah pekerja proyek tampak hanya berjaga di sekitar lokasi sambil mengatur arus lalu lintas secara manual.

Kondisi ini menyebabkan antrean kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, mengular di sepanjang ruas jalan tersebut dan mengganggu mobilitas warga.

Sampai berita ini diturunkan, pihak dinas teknis terkait maupun kontraktor pelaksana proyek pembangunan Gedung Balai Patriot belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tersebut, termasuk soal dugaan kelebihan beban kendaraan di jalan kelas kota itu. (den)

Brimob Gagal Rencana Tawuran di Bekasi Timur

○ Empat Pemuda Bawa Sajam Diamankan

BEKASI (Poskota) – Rencana aksi tawuran di wilayah Bekasi Timur, Kota Bekasi, berhasil digagalkan Satuan Brimob Polda Metro Jaya saat melakukan patroli rutin pada Kamis (4/6) dini hari. Dalam kejadian tersebut, petugas mengamankan empat pemuda yang kedatangan membawa sejumlah senjata tajam dan senjata tumpul.

Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol Henik Maryanto, mengatakan keempat pemuda itu diamankan sekitar pukul 02.30 WIB saat tim patroli menegur gerak-gerik mereka di lokasi kejadian.

"Keempatnya kami amankan saat petugas melakukan patroli sekitar pukul 02.30 WIB," ujar Henik, Kamis (4/6).

Menurut Henik, para pemuda tersebut sempat berusaha melarikan diri ketika petugas mendekat. Namun upaya itu berhasil digagalkan hingga akhirnya mereka diamankan beserta barang bukti yang diduga akan digunakan untuk aksi

kekeraan.

"Gerak-gerik para pemuda dan mencurigakan dan saat dihamiri mereka berusaha kabur. Kami berhasil mengamankan mereka beserta barang bukti," katanya.

Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa satu stik golf, satu bilah golok, satu bilah cendur, satu bilah corbek atau senjata tajam modifikasi, serta satu unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk berkoordinasi dengan kelompok lawan.

Henik menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi aksi kejahatan jalanan maupun tawuran yang meresahkan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, keempat pemuda tersebut telah dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. "Upaya ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya ruang bagi pelaku kejahatan jalanan maupun aksi tawuran yang dapat meresahkan masyarakat," tegasnya. (den)

Pemkab Bekasi Prioritaskan Tiga Ruas Inspeksi Kalimalang pada 2026

BEKASI (Poskota) – Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDA-BMBK) memprioritaskan pembangunan tiga titik ruas Jalan Inspeksi Kalimalang pada tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan jalan yang saat ini telah mencapai sekitar 85 persen.

Kepala Bidang Pembangunan Jalan Dinas SDA-BMBK Kabupaten Bekasi, Dede Chailin, mengatakan tiga ruas yang menjadi fokus utama meliputi batas Kota Bekasi-Cibitung, ruas Tegol Gede-Tegal Danas, serta ruas yang terletak di Kabupaten Karawang.

"Yang menjadi konsen bidang kami itu pada tiga ruas tersebut, di mana arus lalu lintas kendaraan roda dua maupun kendaraan besar belum terlalu lancar. Kemungkinan tiga ruas itu yang menjadi prioritas tahun 2026 ini," ujar Dede, kemarin.

Di menjelaskan, dalam dua tahun terakhir Pemkab Bekasi telah mengalokasikan anggaran cukup besar dari APBD untuk peningkatan Jalan Inspeksi Kalimalang. Hasilnya, kondisi jalan kini dinilai mengalami peningkatan signifikan dan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kita menganggarkan jalur Inspeksi Kalimalang luar biasa, lebih dari Rp100

milial. Kondisi ini sekarang kemandapatannya sekitar 85 persen, tinggal pemeliharaan dan peningkatan fasilitas seperti utilitas," katanya.

Dede menambahkan, sebelumnya jalur tersebut banyak mengalami kerusakan ringan hingga berat, serta belum dilengkapi median jalan. Kondisi itu kerap memicu kendaraan melakukan putar balik sembarangan dan parkir liar di bahu jalan.

Ke depan, pihaknya akan melanjutkan pembangunan median jalan yang masih terputus, terutama di wilayah Kecamatan Tambun Selatan. Namun, pekerjaan tersebut masih terkendala pembebasan lahan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perkotaan, dan Pertahanan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi.

Ia juga menyebut salah satu titik yang belum dapat ditangani berada pada ruas batas Kota Bekasi hingga Jembatan Legenda. Selain persoalan lahan, pembangunan di lokasi tersebut turut berbenturan dengan rencana proyek Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu yang sudah berjalan. "Kami tetap fokus pada pembebasan lahan yang mengalami kerusakan berat sambil menunggu proses pembebasan lahan. Jalan Inspeksi Kalimalang ini merupakan jalur alternatif penting bagi mobilitas masyarakat," pungkasnya. (den)



DISKUSI – Pih Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bitoeh berdiskusi pagi bersama para camat di ruang rapat wali kota, kompleks pemkot Bekasi. Diskusi bersama bertujuan untuk mendorong agar camat beserta jajaran mampu bertransformasi pada pelayanan yang lebih responsif, cepat dan akuntabel. Pih Wali Kota menyampaikan bahwa kegiatan hari ini sebagai momentum penting agar Camat beserta jajaran lebih meningkatkan pelayanan dan dapat merespon lebih cepat setiap persoalan yang ada di wilayahnya sebagai tuntutan utama dalam pelayanan publik saat ini.

Tiga Jemaah Haji Asal Bekasi Wafat di Tanah Suci

BEKASI (Poskota) – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bekasi mencatat tiga jemaah haji asal Bekasi meninggal dunia sebelum puncak ibadah haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina). Sementara dua jemaah lainnya wafat setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji.

Kemenag Kota Bekasi saat ini juga melakukan pendampingan kepada keluarga jemaah yang meninggal dunia selama proses administrasi dan takziah guna memastikan hak-hak ahli waris dapat terpenuhi.

Kepala Kantor Kemenag Kota Bekasi, Rian Fauzi,

menjelaskan dari tiga jemaah yang wafat, satu di antaranya meninggal dunia sebelum puncak ibadah haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina). Sementara dua jemaah lainnya wafat setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji.

"Dua jemaah telah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah hajinya, sedangkan satu jemaah meninggal di Madinah sebelum Armuzna," ujar Rian, Kamis (4/6).

Berdasarkan data Kemenag Kota Bekasi, ketiga jemaah tersebut masing-

masing adalah Arif Nugroho Basuki (58), warga Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, yang meninggal di Madinah akibat kondisi medis sebelum fase Armuzna.

Jemaah kedua, Matroddi Mardjuki (65), warga Pondok Ungu, Kecamatan Medan Satria, wafat saat berada di kawasan tenda jemaah di Mina. Sementara jemaah ketiga, M. Suwarnan (67), warga Perumahan Pondok Cipta, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, meninggal dunia di hotel pemondokan di Makkah

setelah menyelesaikan rangkaian Armuzna.

Rian menyebut pihaknya telah mendampingi keluarga masing-masing jemaah sebagai bentuk empati sekaligus mendampingi keluarga dalam mengurus dokumen kematian dari pemerintah Arab Saudi yang diperlukan untuk proses klaim asuransi.

"Ini kami lakukan sebagai bentuk rasa empati kepada keluarga jemaah yang meninggal di Tanah Suci. Kami juga sudah melakukan takziah," katanya.

Selain penanganan jemaah yang wafat, Ke-

menag Kota Bekasi juga terus memantau kondisi jemaah lainnya yang masih berada di Arab Saudi, termasuk anggota keluarga yang mendampingi.

Kemenag turut berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi untuk menyiapkan posko layanan kesehatan di asrama debarokas. Langkah ini dilakukan guna menyanggah serta memberikan penanganan awal bagi jemaah yang tiba di Tanah Air dalam kondisi kesehatan menurun atau mengalami kelelahan pasca-ibadah. (den)

Bapenda Bekasi Kejar Target Pajak Daerah Rp3,8 Triliun pada 2026

BEKASI (Poskota) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi terus mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak daerah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bekasi, Puji Nugraha, mengatakan target pajak daerah pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3,8 triliun. Penerimaan tersebut bersumber dari berbagai jenis pajak, di antaranya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBBT), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, hingga opsean Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBKNB).

"Hingga akhir Mei 2026, realisasi pajak daerah Kabupaten Bekasi telah mencapai sekitar Rp1,2 triliun atau 31,83 persen dari target Rp3,8 triliun yang ditetapkan tahun ini," ujar Puji, Kamis (4/6).

Ia menyebut capaian tersebut akan terus dijinjok melalui berbagai langkah optimalisasi agar target pendapatan pada semester pertama dapat tercapai sesuai rencana.

"Kami masih memiliki waktu untuk melakukan percepatan sehingga capaian pendapatan daerah pada semester pertama dapat terus meningkat sesuai target yang telah ditetapkan," katanya.

Puji menjelaskan, optimalisasi PAD menjadi semakin penting di tengah adanya penyesuaian transfer keuangan dari pemerintah pusat yang berdampak pada kapasitas fiskal daerah. "Ketika transfer keuangan dari pusat mengalami penyesuaian, daerah harus semakin optimal dalam menggali potensi pendapatan yang dimiliki untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Bapenda juga terus memetakan sektor-sektor potensial yang dapat meningkatkan penerimaan daerah, salah satunya sektor pajak makanan dan minuman yang berkaitan dengan aktivitas industri di Kabupaten Bekasi.



PAJAK – Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Puji Nugraha.

Menurutnya, terdapat sekitar 7.600 perusahaan yang tersebar di 11 kawasan industri di wilayah tersebut. Kondisi ini menjadi potensi besar dalam peningkatan pendapatan, termasuk dari jasa katering yang melayani kebutuhan perusahaan.

Namun demikian, masih terdapat perusahaan yang menggunakan jasa katering dari luar daerah sehingga potensi pajak belum sepenuhnya masuk ke Kabupaten Bekasi. Karenanya, Bapenda terus melakukan pendataan, pembinaan, dan sosialisasi kepada pelaku

usaha. "Kami terus melakukan identifikasi dan pendataan agar potensi pajak yang ada dapat terdapat dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah," kata Puji.

Di sisi lain, peningkatan kepatuhan wajib pajak juga menjadi perhatian. Edukasi kepada masyarakat terus digencarkan untuk meningkatkan kesadaran bahwa pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan.

"Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan pelayanan publik lainnya," ujarnya.

Untuk mempermudah pembayaran, Bapenda Kabupaten Bekasi juga memperluas layanan digital melalui berbagai kanal, seperti QRIS, virtual account, marketplace, hingga gerai ritel modern. "Saat ini masyarakat dapat melakukan pembayaran melalui QRIS, virtual account, marketplace maupun gerai ritel modern sehingga pembayaran pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan," pungkasnya. (den)

Berita dari halaman 1

Nah Ini Dia

Lah Kasi Satpol PP ini dicokok biniya.

Rupanya, sang istri juga sudah pandai tentang ilmu menangguk orang selingkuh, belajar dari suaminya. Dia pun sudah lama mencium gelagat selingkuh suaminya.

Ada pun selingkuhnya Siti Rahmawati, diketahui Staf di kantor BKPSDM Kabupaten Batanghari, Jambi. Sementara itu lelaki M.Yunus bertugas sebagai Kasi penangkapan pol PP Kabupaten Muaro Bungo, Jambi.

Dua PNS tersebut ternyata sudah lama menjalin hubungan. Lantas, istri Kasi penangkapan PP bernama Roqayah merasa

curing atas tingkah laku suaminya karena sering marah-marah ketika di rumah. Roqayah pun mencari informasi rumah selingkuh suaminya itu. Setelah didapat, dia berangkat.

Karena kesalnya Roqayah datang langsung dari Bungo ke kabupaten Batanghari dan langsung menggerbek tempat tinggal selingkuh suaminya di Simpang Aro, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muarabulan Batanghari, Jambi.

Penggerbekan ini dilakukan Sabtu, 5, dalam penggerbekan itu bersama dengan RT dan warga setempat, Roqayah pun langsung marah-marah dengan saudara.

Sang suami mengaku pulang balik perjalanan kerja jauh dan capek.

Oleh karena itu dia cari rumah untuk tinggal sementara. Dia tinggal di rumah siti ketubelan ada kamar kosong "Ada yang menawarkan kamar, ya saya mau saja, kalau pulang balik kan lelah di perjalanannya, ujarnya berbalasan.

"Ada kamar, terus ngmar, diservis oleh perempuan yang punya rumah, terus lupa pulang," timpal Roqayah. Writa ini mengaku sudah cukup sabar atas perbuatan suaminya dan kesal dengan perilaku suaminya. "Biar tau rasa, itu biar batinnya kalau suami gatal dan tidak sabar," paparnya.

Roqayah menyebutkan sebe-

lumnya, perempuan selingkuh suaminya itu bekerja di Kantor Camat Babeko Bungo dan dipindahkan ke Batanghari. "Saya harap dua orang itu di Proses sesuai hukum yang berlaku," ungkapnya.

Terpisah, Kepala BKPSDM Kabupaten Batanghari M Rifa' i Kadri membenarkan ada pegawai yang kedatangan berselingkuh dengan suami orang.

Dia menyebutkan kedatangannya itu Sabtu sekitar pukul 12.00 Wib dan akan diproses sesuai sanksi PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS/ASN. "itu bernama Siti Rahmawati merupakan staf di kantor saya dan saya akan memprosesnya," singkarnya. (Winoto Anung)



PENGELAPAN - Petugas KSKP Pelabuhan Merak saat mengamankan sopir serta kendaraan truk box No Pol B 9726 SXW.

Sopir Bawa Kabar Truk Box Diamankan di Pelabuhan Merak

MERAK (Poskota) - Petugas Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Merak, Polres Cilegon, mengamankan seorang sopir yang diduga membawa kabar kendaraan truk box milik perusahaan di area Pelabuhan Merak, pada Rabu (3/6) malam.

Sopir bernomor MA (31), warga Tanah Sareal, Kota Bogor, itu diamankan di Dermaga 7 Pelabuhan Merak sekitar pukul 19.00 WIB, sesaat sebelum kendaraan yang dikemudikannya sempat hendak menyeberang ke Bakauheni, Lampung.

Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Taripar Laut Silintonga menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berasal dari laporan masyarakat yang masuk melalui layanan Center 110 Polres Cilegon.

"Awalnya petugas piket SPKT KSKP Merak menerima informasi dari operator layanan 110 terkait adanya laporan masyarakat mengenai kendaraan truk box yang diduga dibawa kabar oleh sopirnya," kata Martua, Kamis (4/6).

Laporan tersebut disampaikan oleh pemilik kendaraan, David Novandy, yang mengaku kehilangan truk box bernomor polisi B 9726 SXW yang dibawa pergi oleh sopir tanpa izin.

Pelapor juga memberikan informasi terakhir mengenai keberadaan kendaraan yang terpantau berada di kawasan Dermaga 7 Pelabuhan Merak dan diduga akan menyeberang ke Sumatera. Menindaklanjuti laporan itu, petugas KSKP Merak langsung bergerak ke lokasi dan melakukan pengecekan

di area yang dimaksud. Berkas respons cepat tersebut, kendaraan berhasil ditemukan dan sopir yang menguasainya diamankan sebelum naik ke kapal penyeberangan.

Saat ini, truk box beserta sopir bernomor MA telah diamankan di Makro KSKP Merak untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga telah menghubungkan pelapor guna melengkapi proses hukum yang berjalan.

Kapolres memberikan apresiasi atas respons cepat personel KSKP Merak dalam menindaklanjuti laporan masyarakat melalui layanan 110. "Ini membuktikan layanan 110 benar-benar hadir untuk membantu masyarakat. Layanan ini gratis, cepat, dan setiap laporan akan segera ditindaklanjuti," ujarnya. (rah)

Pemkab Tangerang Minta Keterbukaan Data Program MBG Diperkuat

TANGERANG (Poskota) - Pemkab Tangerang berharap pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dapat membawa peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait keterbukaan data dan sinkronisasi dengan pemerintah daerah.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Agus Supriatna, mengatakan salah satu hal yang dibutuhkan daerah adalah akses informasi yang lebih rinci mengenai sekolah penerima manfaat serta penentuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kami membutuhkan informasi yang lebih lengkap terkait sekolah penerima manfaat maupun lokasi layanan yang sudah ditetapkan agar pemetaan wilayah bisa dilakukan dengan baik," ujar Agus, Kamis (4/6).

Menjelaskan, pemerintah daerah sebenarnya telah menyiapkan data sekolah yang menjadi sasaran program MBG. Namun, informasi mengenai titik layanan yang

telah ditetapkan masih perlu disampaikan secara lebih terbuka agar pemetaan di lapangan dapat berjalan optimal.

"Keterbukaan data akan membantu pemerintah daerah mengidentifikasi wilayah yang masih membutuhkan intervensi program MBG sehingga pemetaan manfaat dapat tercapai," katanya.

Agus menambahkan, dengan adanya pergantian kepemimpinan di BGN, pihaknya berharap komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dapat semakin diperkuat. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program sekolah penerima manfaat.

Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian Kepala BGN dengan mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya. Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6). (ver)



SAMBUT - Erin Fabiana Ansori, salah seorang anggota DPRD Pandeglang dari Fraksi Gerindra.

Gerindra Pandeglang Harap BGN Baru Perkuat Program MBG

PANDEGLANG (Poskota) - Sejumlah anggota DPRD Pandeglang dari Fraksi Gerindra mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang melakukan pergantian Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta jajaran wakilnya.

Pergantian tersebut dinilai sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggota DPRD Pandeglang, Erin Fabiana Ansori, mengatakan kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah responsif terhadap berbagai kritik dan masukan publik terkait implementasi program MBG di daerah.

"Saya mengapresiasi dan mendukung penggantian Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN yang dilakukan oleh pemerintah," ujar Erin, Rabu (3/6).

Menurutnya, Presiden Prabowo telah menunjukkan sikap terbuka dengan mendengar aspirasi masyarakat di tengah berbagai tantangan terhadap pelaksanaan program tersebut.

"Presiden mendengar aspirasi masyarakat. Di tengah banyaknya kritik dan masukan, ini bukti nyata bahwa pemerintah mendengar," katanya.

Erin berharap kepemimpinan baru di BGN dapat membawa perbaikan dalam pelaksanaan program MBG agar lebih optimal dan

menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk pelosok.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Pandeglang dari Fraksi Gerindra, Fikri Pebriansyah, juga menilai keputusan Presiden tersebut tepat dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.

"Ini bukti nyata respons cepat Pak Presiden Prabowo dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat terhadap belum optimalnya program MBG," ujarnya.

ia menambahkan, pergantian pimpinan BGN diharapkan mampu memperkuat kinerja lembaga tersebut dalam menjalankan program gizi nasional.

Fikri juga mengemukakan dukungannya terhadap langkah Presiden yang dianggap telah menunjukkan komitmen dalam memperbaiki pelaksanaan program MBG di daerah.

"Saya sangat mendukung dan mengapresiasi langkah tersebut. Ini bentuk nyata pemerintah mendengar suara rakyat," katanya.

ia berharap ke depan BGN dapat bekerja lebih optimal dalam menjalankan program, sehingga manfaat MBG dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. "Saya berharap jajaran BGN ke depan bisa bekerja lebih baik dan program MBG berjalan sesuai harapan masyarakat," pungkasnya. (fat)

Proyek Rp4 Miliar Alun-alun Pagelaran Dievaluasi

O Dinas Perkim Banten Temukan Kekurangan

PANDEGLANG (Poskota) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten melakukan pengecekan ulang terhadap hasil pembangunan Alun-alun Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Kamis (4/6). Bangunan yang dikerjakan oleh kontraktor CV Karaton Mega Karya tersebut diketahui telah rampung pada akhir 2025 lalu dengan anggaran lebih dari Rp4 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Banten

tahun anggaran 2025.

Pejabat bidang permukiman Dinas Perkim Banten, Bagus Hadiyanto, mengatakan pengecekan dilakukan untuk memastikan kondisi dan manfaat bangunan sebelum diserahkan kepada pemerintah setempat.

"Kami lihat manfaat dan kondisi bangunan sekarang ini, apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Nanti kami koordinasi dengan pihak kontraktor," ujarnya.

ia menjelaskan, hasil pembangunan tersebut harus dipastikan dalam kondisi

baik agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa kondisi bangunan dalam keadaan baik dan bisa bermanfaat untuk masyarakat," katanya.

Terkait pemeriksaan di lapangan, pihaknya menemukan sejumlah titik yang dinilai masih perlu perbaikan. Namun, kerusakan tersebut tidak berada pada bangunan utama, melainkan pada beberapa bagian seperti penge-

catan ulang dan fasilitas pendukung.

"Memang ada beberapa titik yang perlu diperbaiki, tapi bukan pada bangunan utama. Lebih pada pengecatan ulang dan beberapa bagian kecil lainnya," ungkapnya.

Terkait pemeliharaan ke depan, Bagus menjelaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan Alun-alun Pagelaran akan dialihkan kepada pemerintah desa atau kecamatan setempat, karena fasilitas tersebut merupakan aset desa.

"Untuk pemeliharaan sudah dia-

lihan ke pemerintah desa atau kecamatan. Pempropr hanya membangun, sedangkan pengelolannya oleh pemerintah setempat," jelasnya.

ia menambahkan, pihaknya telah merekomendasikan kepada pelaksana proyek untuk segera melakukan perbaikan sejumlah bagian yang masih kurang optimal, termasuk taman bermain anak dan area lapangan.

"Kami sudah berkoordinasi dengan pihak pelaksana, dan mereka meminta waktu satu hingga dua minggu untuk melakukan perbaikan," pungkasnya. (fat)



PEMBANGUNAN - Kondisi alun-alun Pagelaran di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, usai dibangun oleh pihak Dinas Perkim Banten.

Guru Pramuka di Sukadiri Cabuli Siswi SD Ditangkap

TANGERANG (Poskota) - Seorang guru pramuka bernomor DR (26) diamankan aparat kepolisian setelah diduga melakukan pencabulan terhadap sembilan siswi sekolah dasar di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Sebelum ditangkap, pelaku sempat menjadi sasaran aksi kekerasan sebelum akhirnya diamankan aparat.

Bahkan saat digiring menuju mobil polisi, sejumlah warga masih berupaya menjejar pelaku meski sudah dalam pengawasan petugas.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (4/6), saat ratusan warga

mendatangi rumah salah satu korban setelah kasus dugaan pelecehan itu terungkap. Emosi warga tak terbendung hingga pelaku sempat menjadi sasaran aksi kekerasan sebelum akhirnya diamankan aparat.

Bahkan saat digiring menuju mobil polisi, sejumlah warga masih berupaya menjejar pelaku meski sudah dalam pengawasan petugas.

Seorang warga, Nurwidyanto,

mengatakan kasus ini terungkap setelah salah satu korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tua. Laporan tersebut kemudian diteruskan ke Ketua RT hingga memicu aksi warga.

"Awalnya korban memberitahu kan kepada orang tuanya, kemudian dilaporkan ke pihak RT, lalu terjadi aksi penggerudukan," ujarnya, Kamis (4/6).

Kapolsek Mauk AKP I Nyoman Nariana membenarkan bahwa pelaku telah diamankan dan kini ditahan di Mapolsek Mauk. Berdasarkan penyelidikan awal, pelaku diduga mencabuli sembilan siswi di sekolah tempatnya mengajar pramuka.

"Namun demikian semua masih dalam proses penyelidikan," kata Nyoman. (ver)

Truk Boks Muatan Kardus Terbakar Dipicu Korsleting

TANGERANG (Poskota) - Satu unit truk boks tiba-tiba mengeluarkan asap dan terbakar saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Kamis (4/6) siang. Beruntung, sopir berhasil menyelamatkan diri dari insiden tersebut.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.45 WIB. Truk bernomor polisi B-9950-PXR tersebut diduga mengalami gangguan pada bagian belakang ruang kemudi yang berisi tumpukan kardus, sebelum kemudian mengeluarkan asap dan api.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Raden Muhammad Jauhari, mengatakan dugaan sementara kebakaran dipicu oleh panas mesin yang disertai korsleting pada sistem kelistrikan kendaraan.

"Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh panas mesin dan korsleting pada sistem kelistrikan kendaraan," ujar Jauhari dalam keterangan, Kamis (4/6).

Saat kejadian, petugas patroli di lokasi langsung bergerak cepat melakukan pemadaman menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) yang dibawa dalam kendaraan patroli.

Api berhasil dipadamkan sebelum merambat lebih luas. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun, sopir truk dilaporkan mengalami luka bakar di bagian tangan dan telah mendapatkan penanganan medis.

Kombes Jauhari menegaskan, kehadiran personel di lapangan tidak hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan respons cepat terhadap situasi darurat di masyarakat.

"Patroli JAGA JAKARTA" merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat. Ketika terjadi kondisi darurat seperti kebakaran kendaraan, anggota wajib bertindak cepat untuk memberikan pertolongan dan mencegah risiko lebih besar," jelasnya.

Pedagang Cilok di Cikupa Tewas dengan Sejumlah Luka

TANGERANG (Poskota) - Tim Identifikasi Satreskrim Polresta Tangerang bersama Unit Reskrim Polsek Cikupa menemukan jenazah pedagang cilok bernomor P yang ditemukan di sebuah kontrakan di wilayah Cikupa, Kabupaten Tangerang.

Korban berusia 33 tahun itu diketahui berasal dari Bangkalan, Jawa Timur. Selain luka akibat sabitan senjata tajam, polisi juga menemukan sejumlah memar pada tubuh korban.

"Selain luka diduga akibat sabitan tajam, pada tubuh korban juga ditemukan beberapa memar," ujar Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amilulrah, Kamis (4/6).

meninggal korban. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat kasus ini bisa terungkap," katanya.

Korban pertama kali ditemukan di sebuah kontrakan di RT 03 RW 03 Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, pada Selasa (2/6/2026). Korban diduga meninggal sekitar 10 hari sebelum kontrakan tersebut bersama rekannya.

Kapolsek Cikupa AKBP Syamsul Bahri menjelaskan, peristiwa itu terungkap setelah seorang warga yang hendak membeli cilok mendatangi kontrakan korban, namun tidak mendapat respons meski telah beberapa kali mengetuk pintu.

"Karena tidak ada jawaban, warga bersama pemilik kontrakan kemudian membuka pintu menggunakan kunci cadangan," ujarnya. Polisi kini masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap pelaku di balik kematian korban. (ver)

Wardatna Mawa Pasrah Kehilangan Arsip Perjalanan Hidup

Akun Instagram Hilang

JAKARTA (Poskota) – Selegram Wardatna Mawa mengaku pasrah setelah akun Instagram miliknya, @wardatnamawa, yang telah dibangun selama hampir satu dekade sendirian, hilang. Akun tersebut bahkan sempat tiga kali berhasil dipulihkan sebelum akhirnya kembali dihapus oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Wardatna mengatakan dirinya telah berupaya keras untuk mengembalikan akun tersebut. Namun, setelah beberapa kali mengalami kejadian serupa, ia memilih untuk menerima keadaan sambil tetap berharap akun tersebut dapat kembali dipulihkan.

"Qadarullah, Instagram akun hilang. Aku sudah berusaha tiga kali memulihkan akun itu setelah dihapus. Ya sudah lah," ujar Wardatna saat ditemui awak media di kawasan Tendaan, Jakarta Selatan, kemarin.

Kehilangan akun tersebut menjadi pukulan tersendiri bagi ibu tiga anak itu. Pasalnya, akun yang dibuat sejak dirinya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama itu menyimpan banyak dokumentasi dan kenangan perjalanan hidupnya.

Menurut Wardatna, akun tersebut bukan sekadar media sosial, melainkan arsip pribadi yang merekam

berbagai momen penting, termasuk tumbuh kembang anak-anaknya.

"Itu akun aku di SMP. Jadi memang sudah banyak sekali kenangannya. Apalagi basma anak-anak aku. Dari awal aku bangun sampai tumbuh bersama mereka, semuanya ada di akun itu," katanya.

Melecehkan sebuah kecewa, Wardatna berusaha untuk tetap tegar menghadapi situasi tersebut. Ia memilih fokus mencari solusi dibanding terus meratapi kehilangan yang dialaminya.

"Kecewa pasti ada, tetapi aku tidak bisa menyebarkan keadaan. Aku harus bangkit dan tetap berusaha supaya akun itu bisa dipulihkan," tuturnya.

Hilangnya akun Instagram Wardatna terjadi setelah dirinya sempat menjadi sorotan publik karena meninggalkan komentar bernilai negatif pada unggahan milik Inarwati atau Inara Rusli pada pertengahan Mei lalu. Dalam kolom komentar sebuah konten promosi, Wardatna menuliskan kalimat yang menyindir kasus video arsip yang pernah ramai diperbincangkan.



Sementara itu, kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang melibatkan Inarwati dan Insanul Fahmi hingga kini masih bergulir di kepolisian. Proses hukum berlanjut setelah Wardatna menolak upaya penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice yang diajukan oleh kedua tersangka.

Kasubid Penmas Bidhukmas Polda Metro Jaya, Andaru Rahutomo, sebelumnya menyatakan bahwa penolakan tersebut membuat penyidik melanjutkan proses hukum dengan pemeriksaan ahli dan gelar perkara.

"MW berikhtisar surat kepada penyidik dan menolak permintaan RJ tersebut. Dengan begitu, penyidik akan melanjutkan kasus tersebut dengan pemeriksaan ahli dan gelar perkara," kata Andaru pada 23 Mei 2026. (ruh)

Gugatan Nikita Mirzani Ditolak Pengadilan

Dokter Reza Gladys Menang di Pengadilan

JAKARTA (Poskota) – Perseteruan hukum antara selebritas Nikita Mirzani dan dokter kecantikan Reza Gladys terkait gugatan perubatan melalui hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berakhir dengan kemenangan pihak tergugat. Majelis hakim memutuskan gugatan yang diajukan Nikita Mirzani ditolak.

Kasus hukum Reza Gladys, Julianus Sembiring, membenarkan putusan tersebut. Menurut hakim, keputusan hakim merupakan hasil dari rangkaian proses persidangan yang telah berlangsung cukup panjang. "Gugatan gugatan gugatan, dalam hal ini Nikita Mirzani, ditolak seluruhnya," kata Julianus dalam keterangannya, kemarin.

Tidak hanya memenangkan perkara pokok, pihak Reza Gladys juga memperoleh hasil positif atas gugatan balik atau eksekusi yang diajukan bersama Dokter Ataulah Mufid. Majelis hakim mengabulkan sebagian tuntutan yang mereka ajukan. "Gugatan balik Dokter Reza Gladys dan Dokter Ataulah Mufid dalam rekonsiliasi dikabulkan sebagian," ujarnya.

Julianus menilai putusan tersebut membuktikan bahwa argumentasi hukum yang dibangun pihaknya sejak awal persidangan dapat diterima oleh majelis hakim. Ia menyebut berbagai dalil yang diajukan penggugat tidak terbukti dalam persidangan.

Menurutnya, terdapat sejumlah poin dalam gugatan yang dianggap tidak memiliki dasar pembuktian yang kuat. Salah satunya terkait klaim pembelian produk yang diperoleh dalam perkara tersebut.

Pihaknya menilai gugatan tidak dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan terkait pembelian produk yang menjadi objek sengketa.

Selain itu, klaim mengenai ulasan atau review produk yang disebut pernah dilakukan Nikita Mirzani juga dinilai tidak didukung bukti yang cukup selama persidangan berlangsung. Bagi pihak Reza

Gladys, putusan ini menjadi bentuk kepastian hukum sekaligus keadilan setelah melalui proses persidangan yang panjang.

Julianus menegaskan bahwa sebagai warga negara memiliki hak untuk menempuh jalur hukum, sementara hakim memiliki kewenangan independen dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan.

Meski telah memperoleh putusan yang menguntungkan, pihak Reza Gladys masih menunggu salinan

resmi putusan pengadilan sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

"Kami masih menunggu salinan resmi putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara untuk menentukan langkah selanjutnya," kata Julianus. (ruh)

Meski telah memperoleh putusan yang menguntungkan, pihak Reza Gladys masih menunggu salinan



IKLAN BARIS

TARIF IKLAN POSKOTA

No. REKENING Pos Kota
Bank BNI 40 Cab. Harmoni
PT Media Antarkota Jaya
Rekening: 162.900.75

Iklan umum/Display BW:
Rp 40.000/mmk

Iklan kolom UK, 50 s/d 450 mmk:
Rp 20.000/mmk.
(Pengumuman, Laporan Keuangan, Cong Ad, Dukacita/ Iklan Keluarga)

Iklan warna:
Full colour

Rp 60.000/mmk.
Advertorial (FC)
Rp 60.000/mmk.
Advertorial (BW)
Rp 40.000/mmk

Iklan baris umum:
Rp 17.000/baris

sudah termasuk PPN, minimal 5 baris, maksimal 10 baris. 1 Baris = 25 karakter, termasuk spasi, dan tanda baca.

Iklan mini khusus dan bergambar
Rp 100.000,- = 125 karakter

Iklan Lowongan
Rp 30.000/baris

minimal 5 baris maksimal 10 baris 1 baris = 30 karakter termasuk spasi dan tanda baca.

Iklan mini salah satu atau tidak termasuk, semata-mata karena kesalahan teknis. Teks iklan tanggungjawab pemasang/ bukan tanggungjawab penerbit.

Alamat Tata Usaha/Iklan/Keagenan:
Jl. Bang Pitu No. 22

Sukabumi Utara Kebon Jeruk Jakbar

Telepon: 021-22129129 (Hunting)

Hiburan

KONSER WAYANG Mienal Indonesia - HUI Jakarta ke 499 W/Gunung Guntalindo - 19 Juni 2026 - Terminal Blok M Jaksel

Kehilangan

HILANG 1 bh SHM no.4199 an Sili Hattini Santyoto, Dra. Sili Hattini Santyoto, Soemarno Damar, bag. yang menemukin huk 082125367228
KARTU KIR : JKT2002534 JKT2002533 JKT2002538 JKT2002536 590420YK 090908A 80379UP 89727ZF 89725ZF 89726ZF JKT2002537 JKT1443551 892178EV 41508879 89385UP 89151UP 89152UP 890147E JKT781608 PT Indoprima

HILANG AJS No. 566/2005. An. penjual Sarbini Suryaningrat dan pembeli An. Adriani Jufriyani yang terletak di Desa Jatimulya, Kec. Sigatun Timur, Kab. Tanggar, seluas 257 M2.

HILANG BPKB Nopol. B 1836 PZT1 Noin. A022535 Noka : MHKA4D83JD J0019B Atlas Nama : PT Bima Nusa Perdana Sakti

HILANG BPKB Honda Beat 2020 Putih (Noka A.6910 VAH) Noka: MH1JA815L1K115972. Noin. : J181E11016171 Atlas Nama: SAMSUDIN

HILANG SHM No. 2320 Kel. Jakaseta Kel. Bekasi An. Syafiq Kati Mufid U11332

HILANG SURAT keterangan tidak lulus KIR B 9071 GO JKT678731 an Teo Amin

HILANG BPKB Honda Mobil Th.2014 B 1850 TVJ, Noin. L1521121716, Noka: MHROD4850EJ415263, An. Agung Tua Parindungan H.

HILANG BPKB Mobil Honda Jazz Th.2017, Hitam Mulana, B 2085 SZE, Noka:MHROG 5680J704093, Noin. L152 51202429, An. Taufik Rahman

HILANG BPKB Wuling Listrik 2024 (B 1662 KNO) Noka: MHGAGAE210201967 Noin: T2160X5250C2PC040268 Atlas Nama: Amalia Astari

HILANG BPKB Yamaha Freego B 3624 (UWV) Noin. : E31WE0124750 Noka : MH3SEF510 L114336 Atlas nama : Harun

TELAH HILANG sertifikat (tanda buku hak) hak milik no. 24361, No sk 09.01. 02.06.8.02438 Pemegang hak julianus salim, aliam nusun non huanik ci cempaka mas mega grossir hilang di jakarta barat,huk julianus nama PT. Infinita Berkah E salim. 0812-1002-6818

KEHLANGAN KIR B9816 UO JKT49304 PT Dafela Xena antar Nusa B908 goa boo 48149A pt acset Indonesia Tempelan JKT401182 PT Tunas Janda, maksila

KEHLANGAN KIR B9925 uwx JKT2222507 PT chanta internasional B9584 w x Jk 696272 PT sarjasa bentalaatama

KEHLANGAN KIR unit 69437BU-UJ-pj. 69431UP 69434UP 6938UP an PTpta. 69678U 69678U 69661TEU 69548U 69678U 69647U 69565TEU, B9698TEU, B9525TEU, B9698TEU a.k. Melayan Kirim Fit Hub 0878-70871626-0816820384(BU)

TELAH HILANG BPKB motor vespa an soetomo B346100 th 1970 alamat jurangan rt 28 rd no 22/kota bambu an rangka VBC1114519

TELAH HILANG satu sertifikat HGB no.225/kota bambu an HOLYON KAMARUDIN Hub. 082111772819

TELAH KARTU KIR (Nomor Polisi: BG 8211 YG) No uji KIR 617694. Nama Pemilik: Amat Nurdin

TLH HLG kartu + sertifikat uji kir abs. B 9283 PAJ CV JAYA CARPET KRASI D Jkt 1811282

LOWONGAN KERJA

BTH TEKNIKI KompKur/OB Rangkap, P-19-25, single, jir, tggw,rgn pgim tdk dlmkn mgftr lstrknmlnkn, P. Jayakarta Jl Kari, B.G. Jakpus 08510228786

DICARI PENJAJIT Sample Internal Untuk brand fashion ROTOCUHE IG: @rotouch, Lokasi: Kedoya, Jakarta Barat. Hub. 0811 8892 136

DICARI SUPIR, MAX 35 Tahun, SIM B1 Umum & Anak Dalam/ Helper, Punya SIM Motor, Max 35 Tahun, Serabutan, Lamanan Ke : 0812 9420 3291.

DICARI TENAGA wanita bag. pjtjt lur, Umur 40 kebawah, Pendidikan SD/SMP, Syarat punya KTP, Ada uj. Bisa tinggal dim. Minat huk-Mbak. Dea 082113804570

ISUZU ISUZU Panther Mibus 2008, Panther Pickup 2009, Kijang Innova 2008 Surat lengkap STNK-BPKB, Hub. 0811957412/ 089630749094

TOYOTA TOYOTA INNOVA Zenix hybrid tahun 2024 tpe V putih km 47ribu tangan pertama harga 430j nego pulo mas 081318080133

PASANG IKLAN BARIS POSKOTA

GRATIS DI POSKOTA ONLINE

Hanya 1x Bayar Dapat Pemastan di 3 Media IT: Harian Poskota, Poskota.co.id dan E-Paper

Daftar Biro Di Wilayah Adm

JAKARTA TIMUR

MULTI SARANA PERDANA (MSP ADV)
Hub: WA: 0811 840 4884
Email : nurilaniarhanawati@gmail.com

CVARD MULA ADVERTISING

JL PAHLAWAN REVOLUSI No 42 RT05/12 PO BAMBUI JAKTIM
Ph: 0216826020 WA: 08167613111 adubail, ando@yahoo.com

REGAR ADV

Alamat : Jl.Swadaya Raya Rt.2/5 Duren Sawit Jaktim Ph.Fax :
Hub: 0812872554 Email : amien.iklan@gmail.com

SUMBER MAKMUR ADVERTISING

Alamat : Jl.Baski Rahmat, Oponing Besar Selatan No.11 Rt.6/6 Jakarta Timur Ph.Fax : Hub: WA: 08993994027 Email : dony, salim@gmail.com

DARMA POS ADV

Alamat : Jl. Perintis 1 Rt.13/2 No.30, Cipinang Muara, Jakarta Timur Ph: 021-850-8211/021-85092527 Hub: 081289786693 / WA: 085718351609

PTDIAN KEMILAU

Alamat : Jl. Dewi Sartika No.33 Cililitan Jaktim Ph: 021-8009945 Hub: WA: 0821 2504 0620 Email : tboyatid@gmail.com

PT WINY PRANA

Cipinang muara Jaktim Hub:0813.8210.9999

PT DUDA MEDIA KOMUNIKA

Alamat : Jl. Nusa Indah Raya Blok 40 No 8 Rt.11 Rt.6/3 Muka Jaya Duren sawit Jaktim 13460 Ph: 021 8628726 / 86604941 / 8660829 86611940 Hub: 0815-800 8295 / 08888 111 310 / 08888 111 310 (WA) Email : dndkad09@gmail.com / dndkad04@yahoo.co.uk

CV.AMBRI ADVERTISING

Alamat : Jl. WARUNO 23A, RT.006/007 RAWAMANGUN, JAK-TIM 13220 Ph.Fax: 0214751542 Hp: 0856.7566.735-0813.1991.8027 WA: 0813.8226.6390 Email : ambriadvertising@yahoo.com

ROYAL ADVERTISING

Alamat : Jl. Tengori Raya Kios No 3 Rawamangun (Belakang Terminal) Ph.Fax: Hp: WA: 0813 1057 6374 Email : royal.bendak85@gmail.com

SMILE NETWORK INDONESIA

Alamat : Jl. Marungga X01 No 4 Jakarta Timur Ph: (021) 87798402 Hub: WA: 08128159855 Email : smile.netti@yahoo.com

GAUHU ADV

Alamat : Jl. Perjuangan RT 10/01 No 3 Kel. Cipinang Jaktim 13840 Ph: 844.9166, 0822-1356-8003 WA: 0812-1048-341 Email : bgauhu@yahoo.com

PELOPOR ADVERTISING

Alamat : Jl. Kebon Pala No 3, Rt.001 Rv.05 Jatinegara Kampung Melayu, Jaktim Ph: - Hp: WA: 0813-1777-5555 Email : pelopor_adv@yahoo.co.id

ABADI MISU ADV

Alamat : Jl. Kamojang RT 3/4 Pulogadung Jakarta Timur Ph: 021-89131723 Hub: WA: 0817-868-729 Email : brokiran_koran@yahoo.co.id

AA GRAFKA ADV

Alamat : Jl. Kayumas rt 03/04 Pulogadung Jakarta Timur Ph: 021-89131723 Hub: WA: 0817-868-729 Email : brokiran_koran@yahoo.co.id

Pemberitahuan

PANGKILAN KPD Fat Hadiyah uk. kdg ke oto multiraha Beger uk. menyelesaikan hutang putang anda , kami tunggu 1 minggu , apa bila lewat waktu yg telah di tentukan , maka sy selaku pemilik uk.berhak melakukan penekusan dan pengembilan BPKB di oto multia

Klik poskota.co.id

Dapatkan Berita Terupdate Informasi dan Peristiwa

poskota tv poskota.co.id officialposkota poskotaofficial

Mau Pasang Iklan Di koran POSKOTA... Hubungi: wa. 0811 8872 888 Telp: 021-22129129

Mau Berlangganan Koran/Iklan POSKOTA??? Hubungi: wa. 0811 8872 888 Telp: 021-22129129 atau Agen terdekat



SPMB - Posko pengaduan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 Disdik Kota Depok.

Posko SPMB Depok Terima Ratusan Aduan Setiap Hari

DEPOK (Poskota) – Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendidikan (Disdik) membuka posko pengaduan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMP negeri.

Posko ini disediakan selama masa proses SPMB berlangsung, terhitung sejak tahap pra pendaftaran pada 22 Mei hingga 7 Juli 2026. Layanan tersebut dipusatkan di lobi lantai 4 Kantor Dinas Pendidikan Kota Depok.

Panitia SPMB 2026/2027, Bahrudin, mengatakan posko ini dibuka untuk membantu orang tua dan calon peserta didik yang mengalami kendala selama

proses pendaftaran.

"Pengaduan yang paling banyak diterima berkaitan dengan kendala teknis, seperti verifikasi akun, Kartu Keluarga yang baru terbit, serta perbaikan titik koordinat domisili," ujarnya, Rabu (3/6).

Ia menjelaskan, khusus perbaikan titik koordinat, Disdik memberikan toleransi satu kali perubahan. Proses perbaikan dapat dilakukan melalui sekolah tujuan maupun langsung ke Disdik Kota Depok.

"Perbaikan titik koordinat bisa dilakukan di sekolah tujuan. Kami sudah menyiapkan operator di masing-masing sekolah, sehingga orang tua tidak perlu selalu datang ke Disdik," jelasnya.

Dalam pelaksanaannya,

posko pengaduan Disdik menerima rata-rata lebih dari 100 laporan setiap hari. Selain layanan langsung, Disdik juga menyediakan helpdesk melalui WhatsApp untuk memudahkan akses masyarakat.

Untuk jenjang TK dan SD, layanan pengaduan dapat diakses melalui nomor 085286228680, sementara jenjang SMP melalui 085286228682.

"Posko kami buka pada jam kerja pukul 07.00 hingga 16.00 WIB. Layanan WhatsApp juga aktif pada jam yang sama," kata Bahrudin. Ia mengimbau orang tua siswa untuk memahami syarat dan ketentuan SPMB agar proses pendaftaran berjalan lancar tanpa kendala berarti. (den)

Toyota Fortuner Tabrak Dua Motor di Kemang Bogor

○ Satu Tewas, Satu Lainnya Luka

BOGOR (Poskota) – Kecelakaan lalu lintas melibatkan satu unit mobil Toyota Fortuner, dua sepeda motor, serta sebuah warung dan pagar rumah warga terjadi di Jalan Raya Parung-Bogor, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka ringan.

Pli Kanit Gakkum Sat-lantas Polres Bogor Ipda Ares Rachman mengatakan,

kendaraan yang terlibat yakni motor Honda GL

100 bernopol B-5802-KN berinisial RAA, motor Honda Vario berinisial ANP, serta mobil Toyota Fortuner VRZ bernopol D-1195-UAM yang dikemudikan OS.

"Korban meninggal satu orang, sedangkan satu korban lainnya mengalami luka ringan," ujar Ares, Kamis (4/6).

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 03.35 WIB saat mobil Fortuner melaju dari arah Bogor menuju Parung. Setibanya di lokasi, kendaraan tersebut diduga menabrak dua sepeda motor yang

sedang berhenti di pinggir jalan karena mengalami kerusakan.

"Mobil menyerep motor Vario yang sedang berhenti, kemudian menabrak bagian belakang motor Honda GL yang juga berada di lokasi," jelasnya.

Akibat benturan tersebut, pengendara motor Honda GL mengalami luka serius di bagian kepala serta luka di tangan dan kaki, hingga meninggal dunia di tempat kejadian. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSUD Kota Bogor.

Sementara itu, pengendara motor Honda Vario hanya mengalami luka memar di kaki dan telah kembali ke rumahnya setelah mendapat penanganan.

Usai menabrak kedua motor, mobil Fortuner masih terus melaju hingga akhirnya menghantam warung kelontong dan pagar rumah warga di sisi kiri jalan sebelum berhenti.

Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. (den)



TIJAU - Camat Sukmajaya Christine Desima Arthauli saat memimpin Pasar Musi bersama stakeholder terkait, Rabu (04/06/26).

Pasar Musi Sukmajaya Kerap Tergenang Saat Hujan

DEPOK (Poskota) – Kawasan Pasar Musi, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, kembali tergenang saat hujan turun. Kondisi ini diduga akibat tidak optimalnya fungsi drainase yang diperparah oleh penumpukan sampah di saluran air sekitar lokasi.

Menindaklanjuti laporan warga, Camat Sukmajaya Christine Desima Arthauli atau yang akrab disapa Itin, melakukan inspeksi langsung ke kawasan tersebut pada Rabu (3/6). Peninjauan dilakukan untuk memastikan penyebab utama genangan yang kerap terjadi di wilayah pasar.

Dalam pengecekan di lapangan, pihak kecamatan menemukan adanya tumpukan sampah dan sedimentasi yang menghambat aliran air. Selain itu, terdapat sejumlah titik penyempitan saluran yang membuat air

hujan tidak dapat mengalir dengan lancar.

Camat Itin mengatakan pemerintah harus hadir dan cepat merespons setiap keluhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan potensi gangguan aktivitas warga. "Kami ingin setiap informasi dan keluhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti. Kami hadir untuk mencari solusi bersama," ujar Itin.

Ia menjelaskan, persoalan genangan di Pasar Musi tidak hanya dipengaruhi oleh curah hujan, tetapi juga kondisi drainase yang tidak berfungsi optimal akibat sampah dan penyempitan saluran air.

Menurutnya, penanganan masalah tersebut membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah, terutama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok untuk perbaikan

infrastruktur drainase.

"Kami telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk melakukan penanganan dan perbaikan saluran air di lokasi ini," jelasnya.

Itin menegaskan, upaya penataan lingkungan sering kali menimbulkan berbagai respons dari masyarakat maupun pelaku usaha. Namun, langkah tersebut tetap harus dilakukan demi kepentingan bersama.

"Semua upaya ini bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih baik, aman, dan nyaman bagi masyarakat," pungkasnya.

Dengan adanya peninjauan ini, pemerintah kecamatan berharap penanganan genangan di Pasar Musi dapat segera dilakukan secara menyeluruh sehingga tidak kembali mengganggu aktivitas warga maupun pedagang di kawasan tersebut. (den)

Tempat Pijat dan Refleksi di Bogor Timur Terbakar

BOGOR (Poskota) – Sebuah bangunan dua lantai yang digunakan sebagai tempat pijat dan refleksi di Jalan Pajajaran, Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, terbakar hebat pada Kamis (4/6) pagi. Peristiwa tersebut diduga dipicu korsleting listrik dan menyebabkan kerugian hingga Rp500 juta.

Kepala Bidang Pemadam dan Penyelamatan Dinas Damkar Kota Bogor, M Ade Nugraha, mengatakan kebakaran pertama kali dilaporkan sekitar pukul 06.32 WIB oleh pegawai tempat tersebut.

"Objek yang terbakar gedung refleksi dan pijat. Sumber api diduga korsleting listrik," ujar Ade.

Ia menjelaskan, api pertama kali muncul di ruang VIP lantai dua bangunan. Saat kejadian, karyawan diketahui sedang berada di sekitar lokasi dan tidak menyadari awal munculnya api.

"Api terlihat di lantai dua ruang VIP dari atas plafon. Kemudian diketahui oleh petugas keamanan dealer di sekitar lokasi dan langsung dilaporkan," jelasnya.

Menerima laporan tersebut, petugas pemadam kebakaran langsung mengarahkan tiga unit mobil damkar dari Sektor Sukmaji, Yassin, dan Cibuluh untuk melakukan penanganan. Api sempat berkobar dan menimbulkan asap hitam pekat sebelum akhirnya berhasil dipadamkan. (den)



PEMILU - Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah memberikan sambutan pada acara Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Kota Depok, belum lama ini.

Pemkot Depok Dukung Pendidikan Pengawasan Partisipatif Bawaslu

DEPOK (Poskota) – Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, menilai pengawasan partisipatif masyarakat menjadi pendakian penting dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu).

Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok,

pada Selasa (2/6). Chandra menyatakan mendukung penuh kegiatan tersebut karena dinilai mampu memperkuat kualitas demokrasi di daerah.

"Partisipasi publik seperti ini yang kami harapkan dapat hadir dan tumbuh berkembang di Kota Depok, hingga menghasilkan kualitas demokrasi yang baik," ujarnya.

Menurutnya, Pemilu bukan hanya menjadi tang-

gung jawab penyelenggara, tetapi juga seluruh elemen masyarakat yang memiliki peran dalam memastikan proses demokrasi berjalan jujur dan adil.

Melalui kegiatan P2P, peserta mendapatkan edukasi terkait aturan Pemilu, jenis-jenis pelanggaran, hingga mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu.

"Pemilu adalah mesin produksi demokrasi. Kita pastikan mesin ini

berjalan baik di Depok," katanya.

Chandra juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk ikut aktif dalam mengawasi jalannya proses demokrasi dan pembangunan di Kota Depok.

"Tugas kita bersama memastikan mesin demokrasi berjalan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan produk demokrasi yang berkualitas," pungkasnya. (den)

Pemkot Depok Siapkan Rp66 Miliar untuk Gaji ke-13 ASN

DEPOK (Poskota) – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) memastikan pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dilakukan pada Juni 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan pegawai, terutama menjelang tahun ajaran baru.

Kepala BKD Kota Depok, Nuraeni Widayati, mengatakan penerima gaji ke-13 mencakup ribuan pegawai, mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Gaji ke-13 rencananya akan dibayarkan pada bulan Juni 2026 ini untuk 5.106 PNS dan 1.900 PPPK penuh waktu," ujar Nuraeni, Rabu (3/6).

Ia menjelaskan, anggaran yang disiapkan Pemkot Depok untuk pembayaran gaji ke-13 mencapai sekitar Rp66,16 miliar yang

bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026.

Komponen gaji ke-13 tersebut tidak hanya berupa gaji pokok, tetapi juga meliputi tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan jabatan, serta tambahan penghasilan pegawai (TTP).

"Diberikan kepada PNS, CPNS, dan PPPK penuh waktu. Untuk PPPK diberikan secara proporsional sesuai masa kerja sejak pengangkatan," jelasnya.

Nuraeni menambahkan, kebijakan ini telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Wali Kota Depok Nomor 9 Tahun 2026 tentang teknis pemberian gaji ke-13 yang bersumber dari APBD.

Selain ASN, gaji ke-13 juga diberikan kepada pimpinan serta anggota DPRD Kota Depok. "Gaji ke-13 juga diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD," pungkasnya. (den)

Polisi Amankan 6 Pelajar Terkait Pengeroyokan di Baranangsiang

BOGOR (Poskota) – Polisi bergerak cepat mengungkap kasus pengeroyokan terhadap sesama pelajar SMK yang terjadi di kawasan Baranangsiang, Kota Bogor. Dalam peristiwa yang sempat viral di media sosial tersebut, enam pelaku kini telah diamankan oleh pihak kepolisian.

Kapolsek Bogor Timur AKP Asep Sundana mengatakan, para pelaku saat ini telah ditangani Unit PPA-Sankrim Polresta Bogor Kota untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. "(Pelaku pengeroyokan) sudah kita amankan, selanjutnya unit PPA-Sankrim Polresta Bogor Kota," ujar Asep, Kamis (4/6).

Asep menjelaskan, terdapat tujuh pelajar yang terlibat dalam kejadian tersebut, termasuk korban yang terancam dalam video viral. Para pelajar itu berasal dari dua SMK berbeda di Kota Bogor dan diketahui saling mengenal.

"Jadi di dalam video itu ada tujuh orang, salah satunya korban. Pelaku dari SMK yang berbeda, tapi ada juga yang satu sekolah dengan korban," jelasnya.

Sebelumnya, video pengeroyokan tersebut memperlihatkan seorang pelajar ditendang dan diinjak secara bergantian oleh sejumlah siswa lainnya di kawasan permukiman warga di Bogor Timur. Polisi yang melakukan pengecekan ke lokasi juga menemukan sebuah seragam sekolah yang sempat diduga milik korban.

Namun setelah dilakukan penelusuran, seragam tersebut dipastikan bukan milik korban maupun pelaku, melainkan hanya tertinggal di lokasi kejadian.

Asep menambahkan, para pelajar yang terlibat ditambahi saling mengenal sehingga dugaan awal motif pengeroyokan masih terus didalami oleh penyidik. (den)

Operasi Patuh 2026 Fokus Optimalkan Penegakan ETLE

○ Digelar Mulai 8-21 Juni 2026

JAKARTA (Poskota) - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan menggelar Operasi Patuh 2026 sebagai upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas, kecelakaan, serta fatalitas korban kecelakaan. Operasi ini juga bertujuan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang berkeselamatan menjelang Hari Bhayangkara 2026.

Kepala Korlantas Polri, Agus Suryongroho, mengatakan operasi tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta sekaligus menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib.

"Operasi Patuh 2026 dilaksanakan dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menciptakan kondisi Kamseltibcarlantas yang aman dan berkeselamatan menjelang Hari Bhayangkara Tahun 2026," kata Agus di Jakarta Timur, Kamis (4/6).

Operasi Patuh 2026 mengusung tema "Optimalisasi Transformasi Penegakan Hukum Secara Elektronik dalam Mewujudkan Masyarakat Tertib Berlalu Lintas." Pelaksanaan operasi akan mengedepankan pemanfaatan teknologi penegakan hukum berbasis elektronik melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Menurut Agus, operasi harus dikelola secara optimal seperti pelaksanaan Operasi Ketupat dan Operasi Lalin sebagai manifestasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain kegiatan di lapangan, sosialisasi dan publikasi melalui media massa maupun media sosial juga akan digencarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara.

Operasi diawali dengan kegiatan sosialisasi yang kemudian dilanjutkan melalui langkah preventif, preventif, dan penegakan hukum secara bersamaan. Dari keseluruhan kegiatan operasi, penegakan hukum mendapat porsi terbesar, yakni mencapai 50 persen.

Sesuai arahan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, penegakan hukum akan lebih mengutamakan sistem elektronik. Komposisi penindakan terdiri atas 60 persen melalui ETLE, 30 persen penegakan hukum manual, dan 10 persen berupa

teguran simpatik.

Penegakan hukum non-ETLE akan difokuskan pada pelanggaran yang belum dapat terdeteksi perangkat ETLE maupun pelanggaran yang berpotensi menghambat efektivitas sistem elektronik. Pelanggaran tersebut antara lain kendaraan tanpa plat nomor, penggunaan plat nomor yang dimodifikasi, melawan arus, serta pelanggaran lain yang memerlukan tindakan langsung petugas di lapangan.

Selain itu, metode non-ETLE juga diterapkan untuk mengakomodasi wilayah yang belum memiliki perangkat ETLE atau daerah dengan cakupan pengawasan yang masih terbatas. Dengan demikian, pelaksanaan Operasi Patuh 2026 dapat berjalan secara menyeluruh di seluruh Indonesia.

Agus menambahkan, jenis pelanggaran yang menjadi prioritas penindakan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap data pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas setempat.

Selama operasi berlangsung, petugas juga dapat melakukan penegakan hukum secara stasioner dengan syarat seluruh prosedur operasional dan administrasi pemeriksaan telah dipenuhi.

la menegaskan seluruh proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel tanpa praktik transaksional dalam bentuk apa pun.

Melalui Operasi Patuh 2026, Korlantas Polri mengajak masyarakat menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan dan kepatuhan berlalu lintas sebagai budaya. Dengan meningkatnya kesadaran dan disiplin pengguna jalan, diharapkan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas dapat ditekan sehingga tercipta lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan. (rub)



Kepala Korlantas Polri, Agus Suryongroho.

DPR Dorong KAI Terapkan Teknologi Proteksi Modern

○ Cegah Kecelakaan Kereta Terulang

JAKARTA (Poskota) - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar, Doni Akbar, meminta PT KAI segera mempercepat penerapan teknologi keselamatan perkotaan modern guna mencegah terulangnya kecelakaan kereta api seperti yang terjadi di Bekasi beberapa waktu lalu.

Menurut Doni, modernisasi sistem keselamatan operasional harus menjadi prioritas melalui penerapan teknologi Automatic Train Protection (ATP), penguatan infrastruktur rel dengan standar beban gandar (axle load) yang lebih tinggi, serta penggunaan teknologi proteksi perjalanan kereta api yang lebih mutakhir.

"Modernisasi sistem keselamatan operasional melalui penerapan teknologi Automatic Train Protection (ATP), penguatan infrastruktur rel dengan standar axle load yang lebih tinggi, serta pemanfaatan teknologi proteksi perjalanan kereta api yang lebih modern harus diselesaikan agar tidak terjadi lagi kecelakaan kereta api seperti di Bekasi yang lalu," ujar Doni, Kamis (4/6).

la mengkritik langkah PT KAI dan PT INKA yang telah mempercepat penanganan perlintasan sebidang melalui penutupan perlintasan liar, pengurangan jarak perlintasan prioritas, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan.

Doni juga mendorong adanya dukungan pembiayaan untuk penyediaan petugas penjaga perlintasan, pembagian gardu, pemasangan palang pintu, sirine, kamera pengawas (CCTV), serta berbagai perangkat keselamatan lainnya guna meningkatkan keamanan perjalanan kereta api.

Selain aspek keselamatan, Doni menekankan pentingnya peningkatan kualitas data dan modernisasi sarana perkeretaapian. Menurutnya, perkembangan panjang dan kapasitas jaringan rel menjadi salah satu indikator utama kemajuan sektor perkeretaapian nasional sehingga diperlukan data yang akurat dan transparan sebagai dasar pengawasan dan perencanaan kebijakan.

Dalam rapat bersama pemangku kepentingan sektor perkeretaapian, Doni juga mempertanyakan strategi pengendalian sarana kereta api yang telah beroperasi lebih dari 25 tahun. Ia meminta penjelasan terkait efektivitas program pemeliharaan armada, masa pakai sarana setelah rehabilitasi, serta pertimbangan antara modernisasi, perbaikan,

atau penggantian armada secara menyeluruh. Menurut Doni, langkah tersebut penting untuk menjamin keselamatan penumpang sekaligus menjaga kualitas layanan transportasi publik.

Doni turut menyoroti pengembangan program Battery Electric Multiple Unit (BEMU). Ia menilai setiap inovasi teknologi harus memiliki parameter yang jelas untuk mengukur efisiensi implementasi, termasuk dampaknya terhadap penghematan biaya operasional dan peningkatan kualitas layanan.

"Saya berharap sektor perkeretaapian nasional dapat berkembang lebih modern, aman, efisien, dan mampu menjadi tulang punggung transportasi sekaligus penggerak pertumbuhan industri nasional," katanya.

Sorotan terhadap aspek keselamatan perkeretaapian mengacu setelah kecelakaan yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di emplasemen Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 20.52 WIB dan mengakibatkan 106 korban, terdiri atas 16 orang meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif dan 90 orang lainnya mengalami luka-luka.

Hasil investigasi awal Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengungkap bahwa KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi tetap memperoleh sinyal keluar berwarna hijau meskipun sebelumnya terjadi insiden KRL Commuter Line yang sempat melintasi taksi di perlintasan sebidang Bekasi Timur.

Kepala KKNK, Soerjanto Tjahjono, menjelaskan tabrakan antara KA Commuter Line dan kendaraan roda empat di perlintasan JPL Bekasi Timur jalur hilir terjadi pada pukul 20.48.29 WIB. Beberapa menit kemudian, tepatnya pukul 20.50.43 WIB, KA Argo Bromo Anggrek melintas melalui jalur 3 Stasiun Bekasi dengan sinyal keluar berwarna hijau.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mempertanyakan kondisi sinyal tersebut. Menanggapi hal itu, Soerjanto menegaskan bahwa sinyal yang diterima KA Argo Bromo Anggrek saat itu memang menunjukkan warna hijau. Investigasi lebih lanjut masih dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan tersebut dan mengawal sistem keselamatan perkeretaapian nasional. (rub)

Kepuasan Program MBG Hanya 55,6 Persen

○ Isu Ketepatan Sasaran Jadi Sorotan

JAKARTA (Poskota) -

Survei terbaru Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 55,6 persen. Angka tersebut diperoleh dari responden yang mengetahui keberadaan program MBG, yang mencapai 92,1 persen dari total responden.

Penelitian Poltracking Indonesia, Masduki Amrari, mengatakan tingginya tingkat pengetahuan publik terhadap program MBG belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kepuasan masyarakat.

"Sebanyak 92,1 persen responden mengetahui program MBG. Dari kelompok yang mengetahui program MBG, sebanyak 57,9 persen menyatakan ada anggota keluarganya yang menerima manfaat program tersebut. Adapun 39 persen responden mengaku tidak ada anggota keluarganya yang menerima MBG."

Ketika ditanya mengenai keberlanjutan program, mayoritas responden menilai MBG masih perlu diteruskan. Sebanyak 51,9 persen responden menyatakan program tersebut penting untuk dilanjutkan, sedangkan 35,3



Relawan mengantar menu Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam onpreng di Saluran Pelayanan Pemerintah Gizi (SPPG).

Hasil survei juga menunjukkan bahwa dari responden yang mengetahui program MBG, sebanyak 57,9 persen menyatakan ada anggota keluarganya yang menerima manfaat program tersebut. Adapun 39 persen responden mengaku tidak ada anggota keluarganya yang menerima MBG.

Ketika ditanya mengenai keberlanjutan program, mayoritas responden menilai MBG masih perlu diteruskan. Sebanyak 51,9 persen responden menyatakan program tersebut penting untuk dilanjutkan, sedangkan 35,3

persen berpendapat program tidak perlu diteruskan. Sayangnya, 12,8 persen belum menentukan sikap atau menjawab tidak tahu.

Selain tingkat kepuasan dan dukungan terhadap keberlanjutan program, Poltracking juga mengukur persepsi publik terkait ketepatan sasaran MBG. Hasilnya menunjukkan pandangan masyarakat masih terbelah.

Sebanyak 46,3 persen responden menilai program MBG belum tepat sasaran, sementara 45,3 persen berpendapat program tersebut sudah tepat sasaran. Temuan

ini menunjukkan masih adanya ruang perbaikan dalam distribusi dan pelaksanaan program di lapangan.

Survei Poltracking dilakukan pada 11-17 Mei 2026 melalui wawancara tatap muka langsung dengan responden terpilih. Survei menggunakan metode multistage random sampling terhadap 1.220 warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah.

Survei ini memiliki margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (rub)

Noel Divonis 4,5 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp3,435 Miliar

○ Perkara Dugaan Korupsi dan Pemerasan Sertifikasi K3

JAKARTA (Poskota) -

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam perkara dugaan korupsi dan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Selain pidana badan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta juga menjatuhkan denda Rp200 juta serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp3,435 miliar.

Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/6), menyatakan Noel diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp3,435 miliar dan denda Rp200 juta. Selain itu, Noel juga harus membayar denda Rp200 juta serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp3,435 miliar.

Selain itu, hakim menegaskan bahwa denda yang diwajibkan harus dibayar sesuai ketentuan. Jika tidak dibayarkan, harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut.

Apabila hasil penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi atau tidak memungkinkan dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar akan diganti dengan tambahan hukuman penjara selama 9 bulan 10 hari.

Mendengar putusan tersebut, Noel menyatakan menerima seluruh amar putusan majelis hakim. Ia menegaskan sejak awal per-



Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan.

Selain itu, hakim menegaskan bahwa denda yang diwajibkan harus dibayar sesuai ketentuan. Jika tidak dibayarkan, harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut.

Apabila hasil penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi atau tidak memungkinkan dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar akan diganti dengan tambahan hukuman penjara selama 9 bulan 10 hari.

Mendengar putusan tersebut, Noel menyatakan menerima seluruh amar putusan majelis hakim. Ia menegaskan sejak awal per-

sidangan telah mengakui kesalahannya dan tidak akan menumpuk upaya hukum lanjutan.

"Karena saya dari awal konsisten mengakui kesalahan saya, saya anggap hukuman yang diberikan majelis sesuai dengan kejahatan yang saya lakukan," ujar Noel di hadapan majelis hakim.

Ia juga memastikan tidak akan mengajukan banding atas putusan tersebut. "Dengan ini saya menerima," ujar Mulia, katanya.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya,

jaksa menuntut Noel dengan hukuman penjara selama lima tahun, denda Rp250 juta, serta uang pengganti sebesar Rp1,435 miliar.

Dalam tuntutan, jaksa menilai Noel terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menyalahgunakan wewenang dalam mendukung upaya pemertihan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sementara itu, hal yang meringankan adalah sikap kooperatif terdakwa yang mengakui perbuatannya serta mengembalikan sebagian hasil tindak pidana korupsi.

Jaksa mengungkapkan Noel menerima uang sebesar Rp4,435 miliar dalam perkara tersebut. Dari jumlah itu, Rp3 miliar telah dikembalikan ke rekening penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga sisa kerugian yang harus dipulihkan melalui uang pengganti dihitung sebesar Rp1,435 miliar.

Dalam perkara ini, Noel didakwa melanggar Pasal 12 huruf B juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (rub)

Wamen Impas dan Tujuh Pejabat Imigrasi Dinonaktifkan

○ Usai Jadi Tersangka KPK

JAKARTA (Poskota) -

Menteri Imigrasi dan Pemasaran (Impas) Agus Andrianto menonaktifkan Wakil Menteri Imigrasi Siliy Karim serta tujuh pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian.

Agus mengatakan langkah tersebut diambil sebagai bentuk penegakan disiplin internal sekaligus untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa hambatan.

"Sebagai langkah penegakan disiplin internal, Kementerian Imigrasi dan Pemasaran saat ini telah menonaktifkan pejabat terkait dari jabatannya," kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6).

Menurut dia, penonaktifkan dilakukan untuk menjaga kelancaran pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Agus menegaskan seluruh layanan keimigrasian kepada masyarakat tetap berjalan normal dan tidak terdampak oleh proses hukum yang sedang berlangsung.

Ia juga menegaskan bahwa penanganan perkara sepenuhnya menjadi kewenangan KPK. Kementerian Impas, lanjutnya, menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang dilakukan lembaga antiruasah tersebut.

"Kami menyerahkan seluruh proses penanganan perkara kepada KPK dan berkomitmen untuk bersikap kooperatif, termasuk membuka akses data, dokumen, serta keterangan yang diperlukan penyidik," ujarnya.

Agus menilai kasus tersebut menjadi momentum bagi kementerian untuk memperkuat tata kelola keimigrasian agar lebih bersih, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, KPK resmi menaruh Siliy Karim bersama tujuh pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi setelah menetapkan mereka sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kedelapan tersangka langsung ditahan untuk 20 hari pertama guna kepentingan penyidikan. "Adapun delapan orang tersangka kemudian hari ini langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,

Kamis (4/6).

KPK menjerat para tersangka dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto ketentuan dalam KUHP. Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 12B terkait penerimaan gratifikasi.

Selain Siliy Karim, tujuh tersangka lainnya yakni Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, Kasubdit Alit Status Izin Tinggal Tesis Bayu Setyaji, Kasubdit Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, Ketua Tim Alit Status ITAS Juniadi Sri Priambudi, serta staf Subdirektorat Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.

Kasus tersebut kini masih dalam proses penyidikan KPK untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. (sorr)

Menteri Pekerjaan Umum Dedy Mulyono

Berita dari halaman 1

Saiful Mujani Datangi Polda Metro Jaya

"Siap memberikan klarifikasi undangannya. Mudah-mudahan jadi klarifikasi," ujar Saiful.

Saat ditanya mengenai dokumen atau bukti yang dibawa, Saiful mengatakan seluruh penjelasan yang diperlukan telah dikuasainya. Menurut dia, keterangan yang akan disampaikan lebih banyak bertumpu pada pemahaman dan pengetahuannya mengenai persoalan yang dipersalahkan. "Buktinya ada di kepala semua," katanya.

Saiful menegaskan dirinya tidak pernah keberatan memenuhi panggilan aparat penegak hukum. Sebagai warga negara, ia menganggap keahliannya dalam pemeriksaan merupakan bagian dari kewajibannya membantu proses penyidikan.

"Kalau dibutuhkan informasi dari saya atau apa pun, dipanggil pihak yang berwajib, saya pasti datang," ujarnya.

Meski demikian, Saiful mengaku khawatir apabila proses berjalan berkaitan dengan pandangan atau kritik yang pernah disampaikan di ruang publik.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut dirinya secara pribadi, tetapi juga berkaitan dengan kebebasan akademik, kebebasan berekspresi, dan ruang kritik dalam kehidupan demokrasi.

Ia menilai pembungkaman terhadap suara kritis merupakan bagian dari upaya untuk menutup ruang bagi komunitas akademik, intelektual publik, maupun

aktivis yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, Saiful berharap proses hukum yang sedang berlangsung dapat menjadi momentum untuk menguji komitmen bangsa dalam menjaga kebebasan berbicara dan hak menyampaikan kritik.

Sementara itu, kuasa hukum Saiful, Todung Mulya Lubis, memperkirakan proses penggunaan Pasal 246 KUHP mengenai Pemidana (KUHP) dalam perkara tersebut. Menurut Lubis, unsur penghasutan yang dituduhkan belum terfaham secara jelas.

"Saudara Saiful diminta memberikan klarifikasi terkait peristiwa Halalbihalal dalam persangkaan Pasal 246 KUHP mengenai penghasutan," kata Todung.

Todung menilai penerapan pasal tersebut sulit dipahami karena hingga kini tidak jelas siapa pihak yang diduga telah melakukan tindakan yang akan muncul sebagai akibat dari pernyataan yang dipersalahkan.

Ia menegaskan pihaknya tetap menginformasikan proses hukum yang berjalan, namun berharap perkara tersebut dapat dihentikan setelah penyidik menerima klarifikasi dari Saiful karena dinilai tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk dilanjutkan.

Sebelumnya, Todung Mulya Lubis, pengacara Saiful, mengatakan bahwa Saiful merupakan bagian dari komunitas akademik, intelektual publik, maupun

aktivis yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, Saiful berharap proses hukum yang sedang berlangsung dapat menjadi momentum untuk menguji komitmen bangsa dalam menjaga kebebasan berbicara dan hak menyampaikan kritik.

Sementara itu, kuasa hukum Saiful, Todung Mulya Lubis, memperkirakan proses penggunaan Pasal 246 KUHP mengenai Pemidana (KUHP) dalam perkara tersebut. Menurut Lubis, unsur penghasutan yang dituduhkan belum terfaham secara jelas.

"Saudara Saiful diminta memberikan klarifikasi terkait peristiwa Halalbihalal dalam persangkaan Pasal 246 KUHP mengenai penghasutan," kata Todung.

Todung menilai penerapan pasal tersebut sulit dipahami karena hingga kini tidak jelas siapa pihak yang diduga telah melakukan tindakan yang akan muncul sebagai akibat dari pernyataan yang dipersalahkan.

Ia menegaskan pihaknya tetap menginformasikan proses hukum yang berjalan, namun berharap perkara tersebut dapat dihentikan setelah penyidik menerima klarifikasi dari Saiful karena dinilai tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk dilanjutkan.

Sebelumnya, Todung Mulya Lubis, pengacara Saiful, mengatakan bahwa Saiful merupakan bagian dari komunitas akademik, intelektual publik, maupun

aktivis yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, Saiful berharap proses hukum yang sedang berlangsung dapat menjadi momentum untuk menguji komitmen bangsa dalam menjaga kebebasan berbicara dan hak menyampaikan kritik.

Sementara itu, kuasa hukum Saiful, Todung Mulya Lubis, memperkirakan proses penggunaan Pasal 246 KUHP mengenai Pemidana (KUHP) dalam perkara tersebut. Menurut Lubis, unsur penghasutan yang dituduhkan belum terfaham secara jelas.

"Saudara Saiful diminta memberikan klarifikasi terkait peristiwa Halalbihalal dalam persangkaan Pasal 246 KUHP mengenai penghasutan," kata Todung.

Todung menilai penerapan pasal tersebut sulit dipahami karena hingga kini tidak jelas siapa pihak yang diduga telah melakukan tindakan yang akan muncul sebagai akibat dari pernyataan yang dipersalahkan.

Ia menegaskan pihaknya tetap menginformasikan proses hukum yang berjalan, namun berharap perkara tersebut dapat dihentikan setelah penyidik menerima klarifikasi dari Saiful karena dinilai tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk dilanjutkan.

Sebelumnya, Todung Mulya Lubis, pengacara Saiful, mengatakan bahwa Saiful merupakan bagian dari komunitas akademik, intelektual publik, maupun

aktivis yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, Saiful berharap proses hukum yang sedang berlangsung dapat menjadi momentum untuk menguji komitmen bangsa dalam menjaga kebebasan berbicara dan hak menyampaikan kritik.

Sementara itu, kuasa hukum Saiful, Todung Mulya Lubis, memperkirakan proses penggunaan Pasal 246 KUHP mengenai Pemidana (KUHP) dalam perkara tersebut. Menurut Lubis, unsur penghasutan yang dituduhkan belum terfaham secara jelas.

"Saudara Saiful diminta memberikan klarifikasi terkait peristiwa Halalbihalal dalam persangkaan Pasal 246 KUHP mengenai penghasutan," kata Todung.

Todung menilai penerapan pasal tersebut sulit dipahami karena hingga kini tidak jelas siapa pihak yang diduga telah melakukan tindakan yang akan muncul sebagai akibat dari pernyataan yang dipersalahkan.

Ia menegaskan pihaknya tetap menginformasikan proses hukum yang berjalan, namun berharap perkara tersebut dapat dihentikan setelah penyidik menerima klarifikasi dari Saiful karena dinilai tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk dilanjutkan.

Sebelumnya, Todung Mulya Lubis, pengacara Saiful, mengatakan bahwa Saiful merupakan bagian dari komunitas akademik, intelektual publik, maupun

aktivis yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, Saiful berharap proses hukum yang sedang berlangsung dapat menjadi momentum untuk menguji komitmen bangsa dalam menjaga kebebasan berbicara dan hak menyampaikan kritik.

Sementara itu, kuasa hukum Saiful, Todung Mulya Lubis, memperkirakan proses penggunaan Pasal 246 KUHP mengenai Pemidana (KUHP) dalam perkara tersebut. Menurut Lubis, unsur penghasutan yang dituduhkan belum terfaham secara jelas.

"Saudara Saiful diminta memberikan klarifikasi terkait peristiwa Halalbihalal dalam persangkaan Pasal 246 KUHP mengenai penghasutan," kata Todung.

Todung menilai penerapan pasal tersebut sulit dipahami karena hingga kini tidak jelas siapa pihak yang diduga telah melakukan tindakan yang akan muncul sebagai akibat dari pernyataan yang dipersalahkan.

Ia menegaskan pihaknya tetap menginformasikan proses hukum yang berjalan, namun berharap perkara tersebut dapat dihentikan setelah penyidik menerima klarifikasi dari Saiful karena dinilai tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk dilanjutkan.

Sebelumnya, Todung Mulya Lubis, pengacara Saiful, mengatakan bahwa Saiful merupakan bagian dari komunitas akademik, intelektual publik, maupun

aktivis yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, Saiful berharap proses hukum yang sedang berlangsung dapat menjadi momentum untuk menguji komitmen bangsa dalam menjaga kebebasan berbicara dan hak menyampaikan kritik.

Sementara itu, kuasa hukum Saiful, Todung Mulya Lubis, memperkirakan proses penggunaan Pasal 246 KUHP mengenai Pemidana (KUHP) dalam perkara tersebut. Menurut Lubis, unsur penghasutan yang dituduhkan belum terfaham secara jelas.

"Saudara Saiful diminta memberikan klarifikasi terkait peristiwa Halalbihalal dalam persangkaan Pasal 246 KUHP mengenai penghasutan," kata Todung.

Todung menilai penerapan pasal tersebut sulit dipahami karena hingga kini tidak jelas siapa pihak yang diduga telah melakukan tindakan yang akan muncul sebagai akibat dari pernyataan yang dipersalahkan.

Ia menegaskan pihaknya tetap menginformasikan proses hukum yang berjalan, namun berharap perkara tersebut dapat dihentikan setelah penyidik menerima klarifikasi dari Saiful karena dinilai tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk dilanjutkan.

Sebelumnya, Todung Mulya Lubis, pengacara Saiful, mengatakan bahwa Saiful merupakan bagian dari komunitas akademik, intelektual publik, maupun

aktivis yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, Saiful berharap proses hukum yang sedang berlangsung dapat menjadi momentum untuk menguji komitmen bangsa dalam menjaga kebebasan berbicara dan hak menyampaikan kritik.

Sementara itu, kuasa hukum Saiful, Todung Mulya Lubis, memperkirakan proses penggunaan Pasal 246 KUHP mengenai Pemidana (KUHP) dalam perkara tersebut. Menurut Lubis, unsur penghasutan yang dituduhkan belum terfaham secara jelas.

"Saudara Saiful diminta memberikan klarifikasi terkait peristiwa Halalbihalal dalam persangkaan Pasal 246 KUHP mengenai penghasutan," kata Todung.

Todung menilai penerapan pasal tersebut sulit dipahami karena hingga kini tidak jelas siapa pihak yang diduga telah melakukan tindakan yang akan muncul sebagai akibat dari pernyataan yang dipersalahkan.

Ia menegaskan pihaknya tetap menginformasikan proses hukum yang berjalan, namun berharap perkara tersebut dapat dihentikan setelah penyidik menerima klarifikasi dari Saiful karena dinilai tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk dilanjutkan.

Sebelumnya, Todung Mulya Lubis, pengacara Saiful, mengatakan bahwa Saiful merupakan bagian dari komunitas akademik, intelektual publik, maupun



PEMERIKSAAN: Peneliti politik Saiful Mujani (tengah) memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan penghasutan, Kamis (4/6). Saiful hadir didampingi sejumlah tokoh dan kuasa hukum untuk memberikan klarifikasi terkait laporan yang berawal dari pernyataannya dalam forum publik. (Poskota/Al Mansur)

Berita dari halaman 1

80 Ribu Warga Diprediksi Padati GBK di Akhir Pekan

Pengaturan lalu lintas akan dilakukan secara situasional sesuai kondisi di lapangan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan dan keselamatan pengguna jalan," kata Budi, Kamis (4/6).

Berdasarkan perkiraan Dishub, sebanyak 37.800 pengunjung akan memadati kawasan GBK pada Sabtu (6/6), sedangkan pada Minggu (7/6) jumlah pengunjung diprediksi meningkat menjadi sekitar 43.000 orang.

Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, Dishub menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan secara situasional. Pengalihan arus disiapkan berdasarkan rencana yang datang dari arah Blok M, Tanah Abang, Slipi, hingga Tebet menuju berbagai tujuan di kawasan Senayan dan Jakarta Pusat.

Selain pengaturan lalu lintas, Dishub juga menyediakan 10 kantong parkir resmi di kawasan GBK dengan kapasitas sekitar 1.957 kendaraan roda empat dan 8.229 kendaraan roda dua. Lokasi parkir tersebut tersebar di Plaza Tenggara, Plaza Selatan, Istora, Elevated Selatan, Elevated Utara, Akutak, Lapangan ABC, Stadion Madya, Masjid Al-Bina, serta Lapangan Softball.

Budi mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan area parkir yang telah disediakan dan tidak memarkir kendaraan di badan jalan karena berpotensi mengganggu arus lalu lintas.

"Kami mengimbau pengunjung untuk memanfaatkan kantong-kantong parkir resmi yang telah disediakan dan tidak memarkir kendaraan di badan jalan karena dapat mengganggu kelancaran lalu lintas serta aktivitas masyarakat lainnya," ujarnya.

Di tengah tingginya aktivitas yang akan berlangsung di kawasan Senayan, Dishub juga mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Kawasan GBK telah terintegrasi dengan berbagai moda transportasi massal, mulai dari Transjakarta, MRT Jakarta, hingga Commuter Line.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara menuju kawasan GBK antara lain Koridor 1 Kota-Blok M, rute Stasiun Palmerah-Bundaran Senayan, Kalideres-Senayan Bank Jakarta, Ragunan-Senayan Bank Jakarta, Pinang Ranti-Bundaran Senayan, hingga Tanjung Priok-Bundaran Senayan. Sementara itu, MRT Jakarta melayani penumpang melalui Stasiun Istora Mandiri dengan jam operasional pukul 05.00 hingga 24.00 WIB.

"Penggunaan transportasi umum merupakan pilihan yang paling efektif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan. Kami mengajak masyarakat memanfaatkan layanan Transjakarta, MRT Jakarta, maupun Commuter Line agar perjalanan lebih nyaman, aman, dan efisien," tutur Budi.

Ia juga mengimbau masyarakat yang tidak memiliki kepentingan menuju kawasan GBK untuk menghindari ruas jalan di sekitar lokasi kegiatan dan menyesuaikan waktu perjalanan dengan kondisi lalu lintas yang berlaku.

Menurut Budi, keberhasilan pengelolaan lalu lintas selama akhir pekan bergantung pada kerja sama seluruh pihak, baik penyelenggara, aparat, maupun masyarakat pengguna jalan. "Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dalam menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas selama berlangsungnya berbagai kegiatan di kawasan GBK. Dengan kolaborasi seluruh pihak, kami optimis seluruh kegiatan dapat berjalan lancar tanpa mengganggu mobilitas masyarakat secara umum," katanya.

Pada akhir pekan ini, kawasan GBK menjadi pusat berbagai kegiatan besar, di antaranya konser EXO Planet #6 ExhOrizon di Jakarta di Indonesia Arena, konser Raisa "Love & Let Go" di JICC Plenary Hall, turnamen bulu tangkis Polystar Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Festival Hutan Nusantara 2026 di Jalan Kota GBK, Hero E-Sport PUBG di Tennis Indoor, serta pameran Indofest 2026 di JICC Hall B. Beragam agenda tersebut diperkirakan menjadikan kawasan Senayan sebagai salah satu titik keramaian terbesar di Jakarta sepanjang akhir pekan ini. (CR-4)

Kesulitan serupa dirasakan oleh nelayan lainnya yang beraktivitas di kawasan Muara Angke. Jumlah yang menampung di jalur keluar masuk perahu dinilai mengganggu aktivitas nelayan sekaligus mengancam ekosistem perairan.

Ketua RW 22 Kelurahan Muara Angke, Bani, mengatakan keberadaan sampah di kawasan muara telah menjadi persoalan serius bagi masyarakat. Selain mengganggu mobilitas nelayan, kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap hasil tangkapan laut.

"Karena itu, lintasan keluar masuknya nelayan," kata Bani.

Ia menjelaskan, sampah yang mengumpul dan menumpuk di perairan membuat nelayan semakin sulit mencari ikan maupun hasil laut lainnya. Dampaknya, produktivitas nelayan terus menurun.

Bani berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), memberikan perhatian lebih terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, perlindungan terhadap nelayan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga pemulihan lingkungan bercampur dengan keberlanjutan mereka. "Kalau mereka menengahi nelayan, bukan hanya nelayan modern, tetapi semua nelayan yang ada di DKI itu adalah tanggung jawabnya daripada KPKP," tegasnya.

Penanganan Tersebut Terkait hal ini, Pengawas Pesisir Teluk Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Supendi, mengatakan kondisi tersebut bukan disebabkan terhentinya penanganan sampah, melainkan akibat kesenjangan alat berat yang menghambat proses pengangkutan.

Kendati demikian, ia menambahkan petugas tetap melakukan penanganan sampah setiap hari meski alat berat yang biasa digunakan mengalami kerusakan selama lebih dari tiga minggu.

"Setiap hari juga kita tangani sampahnya. Cuma hampir tiga minggu lebih alat berat rusak, akhirnya tumpukannya sampai tinggi," kata Supendi.

Sementara itu, Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Supendi, mengatakan, kondisi tersebut bukan disebabkan terhentinya penanganan sampah, melainkan akibat kesenjangan alat berat yang menghambat proses pengangkutan.

Kendati demikian, ia menambahkan petugas tetap melakukan penanganan sampah setiap hari meski alat berat yang biasa digunakan mengalami kerusakan selama lebih dari tiga minggu.

"Setiap hari juga kita tangani sampahnya. Cuma hampir tiga minggu lebih alat berat rusak, akhirnya tumpukannya sampai tinggi," kata Supendi.

Sementara itu, Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Supendi, mengatakan, kondisi tersebut bukan disebabkan terhentinya penanganan sampah, melainkan akibat kesenjangan alat berat yang menghambat proses pengangkutan.

Kendati demikian, ia menambahkan petugas tetap melakukan penanganan sampah setiap hari meski alat berat yang biasa digunakan mengalami kerusakan selama lebih dari tiga minggu.

"Setiap hari juga kita tangani sampahnya. Cuma hampir tiga minggu lebih alat berat rusak, akhirnya tumpukannya sampai tinggi," kata Supendi.

Sementara itu, Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Supendi, mengatakan, kondisi tersebut bukan disebabkan terhentinya penanganan sampah, melainkan akibat kesenjangan alat berat yang menghambat proses pengangkutan.

Kendati demikian, ia menambahkan petugas tetap melakukan penanganan sampah setiap hari meski alat berat yang biasa digunakan mengalami kerusakan selama lebih dari tiga minggu.

"Setiap hari juga kita tangani sampahnya. Cuma hampir tiga minggu lebih alat berat rusak, akhirnya tumpukannya sampai tinggi," kata Supendi.

Sementara itu, Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Supendi, mengatakan, kondisi tersebut bukan disebabkan terhentinya penanganan sampah, melainkan akibat kesenjangan alat berat yang menghambat proses pengangkutan.

Kesulitan serupa dirasakan oleh nelayan lainnya yang beraktivitas di kawasan Muara Angke. Jumlah yang menampung di jalur keluar masuk perahu dinilai mengganggu aktivitas nelayan sekaligus mengancam ekosistem perairan.

Ketua RW 22 Kelurahan Muara Angke, Bani, mengatakan keberadaan sampah di kawasan muara telah menjadi persoalan serius bagi masyarakat. Selain mengganggu mobilitas nelayan, kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap hasil tangkapan laut.

"Karena itu, lintasan keluar masuknya nelayan," kata Bani.

Ia menjelaskan, sampah yang mengumpul dan menumpuk di perairan membuat nelayan semakin sulit mencari ikan maupun hasil laut lainnya. Dampaknya, produktivitas nelayan terus menurun.

Bani berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), memberikan perhatian lebih terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, perlindungan terhadap nelayan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga pemulihan lingkungan bercampur dengan keberlanjutan mereka. "Kalau mereka menengahi nelayan, bukan hanya nelayan modern, tetapi semua nelayan yang ada di DKI itu adalah tanggung jawabnya daripada KPKP," tegasnya.

Penanganan Tersebut Terkait hal ini, Pengawas Pesisir Teluk Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Supendi, mengatakan kondisi tersebut bukan disebabkan terhentinya penanganan sampah, melainkan akibat kesenjangan alat berat yang menghambat proses pengangkutan.

Kendati demikian, ia menambahkan petugas tetap melakukan penanganan sampah setiap hari meski alat berat yang biasa digunakan mengalami kerusakan selama lebih dari tiga minggu.

"Setiap hari juga kita tangani sampahnya. Cuma hampir tiga minggu lebih alat berat rusak, akhirnya tumpukannya sampai tinggi," kata Supendi.

Sementara itu, Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Supendi, mengatakan, kondisi tersebut bukan disebabkan terhentinya penanganan sampah, melainkan akibat kesenjangan alat berat yang menghambat proses pengangkutan.

Kendati demikian, ia menambahkan petugas tetap melakukan penanganan sampah setiap hari meski alat berat yang biasa digunakan mengalami kerusakan selama lebih dari tiga minggu.

"Setiap hari juga kita tangani sampahnya. Cuma hampir tiga minggu lebih alat berat rusak, akhirnya tumpukannya sampai tinggi," kata Supendi.

Sementara itu, Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Supendi, mengatakan, kondisi tersebut bukan disebabkan terhentinya penanganan sampah, melainkan akibat kesenjangan alat berat yang menghambat proses pengangkutan.

Kendati demikian, ia menambahkan petugas tetap melakukan penanganan sampah setiap hari meski alat berat yang biasa digunakan mengalami kerusakan selama lebih dari tiga minggu.

"Setiap hari juga kita tangani sampahnya. Cuma hampir tiga minggu lebih alat berat rusak, akhirnya tumpukannya sampai tinggi," kata Supendi.

Sementara itu, Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Supendi, mengatakan, kondisi tersebut bukan disebabkan terhentinya penanganan sampah, melainkan akibat kesenjangan alat berat yang menghambat proses pengangkutan.

Kendati demikian, ia menambahkan petugas tetap melakukan penanganan sampah setiap hari meski alat berat yang biasa digunakan mengalami kerusakan selama lebih dari tiga minggu.

"Setiap hari juga kita tangani sampahnya. Cuma hampir tiga minggu lebih alat berat rusak, akhirnya tumpukannya sampai tinggi," kata Supendi.

Sementara itu, Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Supendi, mengatakan, kondisi tersebut bukan disebabkan terhentinya penanganan sampah, melainkan akibat kesenjangan alat berat yang menghambat proses pengangkutan.

Kesulitan serupa dirasakan oleh nelayan lainnya yang beraktivitas di kawasan Muara Angke. Jumlah yang menampung di jalur keluar masuk perahu dinilai mengganggu aktivitas nelayan sekaligus mengancam ekosistem perairan.

Ketua RW 22 Kelurahan Muara Angke, Bani, mengatakan keberadaan sampah di kawasan muara telah menjadi persoalan serius bagi masyarakat. Selain mengganggu mobilitas nelayan, kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap hasil tangkapan laut.

"Karena itu, lintasan keluar masuknya nelayan," kata Bani.

Ia menjelaskan, sampah yang mengumpul dan menumpuk di perairan membuat nelayan semakin sulit mencari ikan maupun hasil laut lainnya. Dampaknya, produktivitas nelayan terus menurun.

Bani berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), memberikan perhatian lebih terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, perlindungan terhadap nelayan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga pemulihan lingkungan bercampur dengan keberlanjutan mereka. "Kalau mereka menengahi nelayan, bukan hanya nelayan modern, tetapi semua nelayan yang ada di DKI itu adalah tanggung jawabnya daripada KPKP," tegasnya.

Penanganan Tersebut Terkait hal ini, Pengawas Pesisir Teluk Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Supendi, mengatakan kondisi tersebut bukan disebabkan terhentinya penanganan sampah, melainkan akibat kesenjangan alat berat yang menghambat proses pengangkutan.

Kendati demikian, ia menambahkan petugas tetap melakukan penanganan sampah setiap hari meski alat berat yang biasa digunakan mengalami kerusakan selama lebih dari tiga minggu.

"Setiap hari juga kita tangani sampahnya. Cuma hampir tiga minggu lebih alat berat rusak, akhirnya tumpukannya sampai tinggi," kata Supendi.

Sementara itu, Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Supendi, mengatakan, kondisi tersebut bukan disebabkan terhentinya penanganan sampah, melainkan akibat kesenjangan alat berat yang menghambat proses pengangkutan.

Kendati demikian, ia menambahkan petugas tetap melakukan penanganan sampah setiap hari meski alat berat yang biasa digunakan mengalami kerusakan selama lebih dari tiga minggu.

"Setiap hari juga kita tangani sampahnya. Cuma hampir tiga minggu lebih alat berat rusak, akhirnya tumpukannya sampai tinggi," kata Supendi.

Sementara itu, Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Supendi, mengatakan, kondisi tersebut bukan disebabkan terhentinya penanganan sampah, melainkan akibat kesenjangan alat berat yang menghambat proses pengangkutan.

Kendati demikian, ia menambahkan petugas tetap melakukan penanganan sampah setiap hari meski alat berat yang biasa digunakan mengalami kerusakan selama lebih dari tiga minggu.

"Setiap hari juga kita tangani sampahnya. Cuma hampir tiga minggu lebih alat berat rusak, akhirnya tumpukannya sampai tinggi," kata Supendi.

Sementara itu, Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Supendi, mengatakan, kondisi tersebut bukan disebabkan terhentinya penanganan sampah, melainkan akibat kesenjangan alat berat yang menghambat proses pengangkutan.

Kendati demikian, ia menambahkan petugas tetap melakukan penanganan sampah setiap hari meski alat berat yang biasa digunakan mengalami kerusakan selama lebih dari tiga minggu.

"Setiap hari juga kita tangani sampahnya. Cuma hampir tiga minggu lebih alat berat rusak, akhirnya tumpukannya sampai tinggi," kata Supendi.

Sementara itu, Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Supendi, mengatakan, kondisi tersebut bukan disebabkan terhentinya penanganan sampah, melainkan akibat kesenjangan alat berat yang menghambat proses pengangkutan.

Kesulitan serupa dirasakan oleh nelayan lainnya yang beraktivitas di kawasan Muara Angke. Jumlah yang menampung di jalur keluar masuk perahu dinilai mengganggu aktivitas nelayan sekaligus mengancam ekosistem perairan.

Ketua RW 22 Kelurahan Muara Angke, Bani, mengatakan keberadaan sampah di kawasan muara telah menjadi persoalan serius bagi masyarakat. Selain mengganggu mobilitas nelayan, kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap hasil tangkapan laut.

"Karena itu, lintasan keluar masuknya nelayan," kata Bani.

Ia menjelaskan, sampah yang mengumpul dan menumpuk di perairan membuat nelayan semakin sulit mencari ikan maupun hasil laut lainnya. Dampaknya, produktivitas nelayan terus menurun.

Bani berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), memberikan perhatian lebih terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, perlindungan terhadap nelayan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga pemulihan lingkungan bercampur dengan keberlanjutan mereka. "Kalau mereka menengahi nelayan, bukan hanya nelayan modern, tetapi semua nelayan yang ada di DKI itu adalah tanggung jawabnya daripada KPKP," tegasnya.

Penanganan Tersebut Terkait hal ini, Pengawas Pesisir Teluk Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Supendi, mengatakan kondisi tersebut bukan disebabkan terhentinya penanganan sampah, melainkan akibat kesenjangan alat berat yang menghambat proses pengangkutan.

Kendati demikian, ia menambahkan petugas tetap melakukan penanganan sampah setiap hari meski alat berat yang biasa digunakan mengalami kerusakan selama lebih dari tiga minggu.

"Setiap hari juga kita tangani sampahnya. Cuma hampir tiga minggu lebih alat berat rusak, akhirnya tumpukannya sampai tinggi," kata Supendi.

Sementara itu, Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Supendi, mengatakan, kondisi tersebut bukan disebabkan terhentinya penanganan sampah, melainkan akibat kesenjangan alat berat yang menghambat proses pengangkutan.

Kendati demikian, ia menambahkan petugas tetap melakukan penanganan sampah setiap hari meski alat berat yang biasa digunakan mengalami kerusakan selama lebih dari tiga minggu.

"Setiap hari juga kita tangani sampahnya. Cuma hampir tiga minggu lebih alat berat rusak, akhirnya tumpukannya sampai tinggi," kata Supendi.

Sementara itu, Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Supendi, mengatakan, kondisi tersebut bukan disebabkan terhentinya penanganan sampah, melainkan akibat kesenjangan alat berat yang menghambat proses pengangkutan.

Kendati demikian, ia menambahkan petugas tetap melakukan penanganan sampah setiap hari meski alat berat yang biasa digunakan mengalami kerusakan selama lebih dari tiga minggu.

"Setiap hari juga kita tangani sampahnya. Cuma hampir tiga minggu lebih alat berat rusak, akhirnya tumpukannya sampai tinggi," kata Supendi.

Sementara itu, Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Supendi, mengatakan, kondisi tersebut bukan disebabkan terhentinya penanganan sampah, melainkan akibat kesenjangan alat berat yang menghambat proses pengangkutan.

Kendati demikian, ia menambahkan petugas tetap melakukan penanganan sampah setiap hari meski alat berat yang biasa digunakan mengalami kerusakan selama lebih dari tiga minggu.

"Setiap hari juga kita tangani sampahnya. Cuma hampir tiga minggu lebih alat berat rusak, akhirnya tumpukannya sampai tinggi," kata Supendi.

Sementara itu, Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Supendi, mengatakan, kondisi tersebut bukan disebabkan terhentinya penanganan sampah, melainkan akibat kesenjangan alat berat yang menghambat proses pengangkutan.

Kesulitan serupa dirasakan oleh nelayan lainnya yang beraktivitas di kawasan Muara Angke. Jumlah yang menampung di jalur keluar masuk perahu dinilai mengganggu aktivitas nelayan sekaligus mengancam ekosistem perairan.

Ketua RW 22 Kelurahan Muara Angke, Bani, mengatakan keberadaan sampah di kawasan muara telah menjadi persoalan serius bagi masyarakat. Selain mengganggu mobilitas nelayan, kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap hasil tangkapan laut.

"Karena itu, lintasan keluar masuknya nelayan," kata Bani.

Ia menjelaskan, sampah yang mengumpul dan menumpuk di perairan membuat nelayan semakin sulit mencari ikan maupun hasil laut lainnya. Dampaknya, produktivitas nelayan terus menurun.

Bani berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), memberikan perhatian lebih terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, perlindungan terhadap nelayan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga pemulihan lingkungan bercampur dengan keberlanjutan mereka. "Kalau mereka menengahi nelayan, bukan hanya nelayan modern, tetapi semua nelayan yang ada di DKI itu adalah tanggung jawabnya daripada KPKP," tegasnya.

Penanganan Tersebut Terkait hal ini, Pengawas Pesisir Teluk Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Supendi, mengatakan kondisi tersebut bukan disebabkan terhentinya penanganan sampah, melainkan akibat kesenjangan alat berat yang menghambat proses pengangkutan.

Kendati demikian, ia menambahkan petugas tetap melakukan penanganan sampah setiap hari meski alat berat yang biasa digunakan mengalami kerusakan selama lebih dari tiga minggu.

"Setiap hari juga kita tangani sampahnya. Cuma hampir tiga minggu lebih alat berat rusak, akhirnya tumpukannya sampai tinggi," kata Supendi.

Sementara itu, Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Supendi, mengatakan, kondisi tersebut bukan disebabkan terhentinya penanganan sampah, melainkan akibat kesenjangan alat berat yang menghambat proses pengangkutan.

Kendati demikian, ia menambahkan petugas tetap melakukan penanganan sampah setiap hari meski alat berat yang biasa digunakan mengalami kerusakan selama lebih dari tiga minggu.

"Setiap hari juga kita tangani sampahnya. Cuma hampir tiga minggu lebih alat berat rusak, akhirnya tumpukannya sampai tinggi," kata Supendi.

Sementara itu, Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Supendi, mengatakan, kondisi tersebut bukan disebabkan terhentinya penanganan sampah, melainkan akibat kesenjangan alat berat yang menghambat proses pengangkutan.

Kendati demikian, ia menambahkan petugas tetap melakukan penanganan sampah setiap hari meski alat berat yang biasa digunakan mengalami kerusakan selama lebih dari tiga minggu.

"Setiap hari juga kita tangani sampahnya. Cuma hampir tiga minggu lebih alat berat rusak, akhirnya tumpukannya sampai tinggi," kata Supendi.

Sementara itu, Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Supendi, mengatakan, kondisi tersebut bukan disebabkan terhentinya penanganan sampah, melainkan akibat kesenjangan alat berat yang menghambat proses pengangkutan.

Kendati demikian, ia menambahkan petugas tetap melakukan penanganan sampah setiap hari meski alat berat yang biasa digunakan mengalami kerusakan selama lebih dari tiga minggu.

"Setiap hari juga kita tangani sampahnya. Cuma hampir tiga minggu lebih alat berat rusak, akhirnya tumpukannya sampai tinggi," kata Supendi.

Sementara itu, Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Supendi, mengatakan, kondisi tersebut bukan disebabkan terhentinya penanganan sampah, melainkan akibat kesenjangan alat berat yang menghambat proses pengangkutan.

POSKOTA
Media Independen

Diterbitkan oleh :
PT Media Antarkota Jaya
sejak 15 April 1970 di Jakarta

Pendiri : H. Hamoko (Almarhum)
H. Tahir (Almarhum), Yachya Suryawinata (Almarhum)

Direktur Utama/Pemimpin



APRESIASI - Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, kemarin. Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur pelaksana Program MBG yang telah mengabdikan diri di berbagai daerah, kepala Negara menilai dedikasi para pelaksana menjadi fondasi penting dalam menjalankan program strategis yang menajamkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Serangan Digital di Indonesia Capai 5,5 Miliar Kasus

○ Ancaman Kejahatan Siber Meningkat

JAKARTA (Poskota) - Ancaman kejahatan siber di Indonesia terus menunjukkan peningkatan seiring pesatnya transformasi digital yang terjadi di berbagai sektor. Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat literasi digital guna menghadapi berbagai modus kejahatan yang semakin kompleks.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman mengungkapkan, kejahatan siber yang saat ini marak terjadi meliputi penipuan data pribadi, penipuan daring, penyebaran hoaks, provokasi, peretasan sistem hingga penyebaran propaganda radikalisme melalui platform digital.

Dalam pernyataan video yang disampaikan kemarin, Dudung mengatakan ruang digital kini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sehingga seluruh pihak perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman yang muncul.

Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), jumlah serangan siber sepanjang 2025 mencapai 5,5 miliar serangan. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan rata-rata tahunan pada periode 2020 hingga 2024.

"Jumlah serangan siber sepanjang tahun 2025 mencapai 5,5 miliar serangan. Angka tersebut melonjak tujuh kali lipat atau naik 714 persen dibandingkan rata-rata tahunan selama periode 2020-2024," ujar Dudung.

Menurutnya, tren peningkatan serangan siber masih berlanjut pada awal 2026. Dalam kurun waktu 1 Januari hingga 15 April 2026, tercatat sebanyak 1,52 miliar serangan siber telah terjadi di Indonesia.

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah terus memperkuat sistem keamanan siber nasional melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait guna melindungi infrastruktur digital dan data masyarakat.

Dudung juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta menjaga keamanan data pribadi. Selain itu, peningkatan literasi digital dinilai menjadi kunci untuk menghindari berbagai bentuk penipuan dan penyebaran informasi palsu di ruang digital.

"Kita harus lebih bijak menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terpeyakan informasi palsu maupun tindakan penipuan digital," tegasnya. (rub)

DPR Fokus Tampung Masukan RUU Pemilu

JAKARTA (Poskota) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyatakan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu saat ini masih difokuskan pada penyempurnaan aspirasi publik. Langkah tersebut dilakukan karena pelaksanaan pemilu berikutnya masih cukup lama sehingga ruang untuk menghimpun berbagai masukan masih terbuka lebar.

Menurut Bahtra, Komisi II DPR ingin memastikan seluruh pandangan dan usulan dari berbagai kalangan dapat terakomodasi sebelum pembahasan resmi revisi UU Pemilu dimulai. Dengan demikian, substansi yang nantinya masuk ke dalam draf RUU benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

la menjelaskan, tugas Komisi II saat ini adalah terus membuka ruang partisipasi publik guna menyempurnakan materi revisi UU Pemilu. Sejumlah pakar juga telah diundang untuk memberikan pandangan terkait perbaikan sistem



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong (kiri).

kepemiluan dan demokrasi di Indonesia. "Terakhir pada Selasa lalu kami mengundang para pakar, termasuk Prof. Siti Zuhro dan sejumlah akade-

mi lainnya, dalam rangka membuka ruang partisipasi publik karena kami ingin melakukan berbagai perbaikan," kata Bahtra di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6).

Bahtra menilai penyempurnaan regulasi kepeiluan penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu sekaligus memperkuat demokrasi Indonesia pada masa mendatang. Karena itu, berbagai masukan yang diperoleh akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan revisi UU Pemilu.

Meski masih dalam tahap peninjauan aspirasi, Bahtra menegaskan Komisi II DPR pada prinsipnya telah siap memasuki pembahasan substansi revisi UU Pemilu, termasuk membahas pasal demi pasal yang akan dimasukkan dalam perubahan regulasi tersebut.

Selain melibatkan akademisi dan kelompok masyarakat, Komisi II juga berencana menghimpun pandangan dari partai politik, baik yang memiliki

kursi di parlemen maupun yang berada di luar parlemen. Dalam waktu dekat, Komisi II akan melakukan kunjungan ke sejumlah partai politik untuk meminta masukan terkait revisi UU Pemilu.

Menurut Bahtra, langkah tersebut penting agar revisi UU Pemilu mampu mengakomodasi kepentingan seluruh peserta pemilu secara adil dan proporsional. "Komisi II akan terus menampung aspirasi dari berbagai pihak dan berbagai kelompok. Kami juga akan meminta masukan dari partai-partai yang ada di parlemen maupun di luar parlemen agar seluruh aspirasi dapat terakomodasi dalam revisi UU Pemilu," ujarnya.

Dengan proses peninjauan yang lebih luas, DPR berharap revisi UU Pemilu dapat menghasilkan sistem pemilu yang lebih baik, memperkuat kualitas demokrasi, serta menjawab tantangan penyelenggaraan pemilu di masa depan. (rub)

PDIP dan Presiden Timor Leste Bahas Rencana Kunjungan Megawati

○ Dijadwalkan Terima Penghargaan Tertinggi

DILI (Poskota) - Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menerima kunjungan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan dan Ketua Komisi I DPR RI Hasto Kristiyanto di Istana Presiden Nicolau Lobato, Dili, kemarin. Pertemuan tersebut membahas persiapan kunjungan Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno-Putri ke Timor Leste pada Juli 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Megawati dijadwalkan menerima anugerah "Grand Collar Order of Timor Leste", penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah Timor Leste kepada tokoh yang dinilai berjasa bagi hubungan dan kerja sama internasional.

Hasto mengatakan Presiden Ramos-Horta menyampaikan salamu hangat kepada Megawati dan rombongan kedatangannya di Dili. Presiden Timor Leste juga telah menginstruksikan jajaran terkait untuk membantu seluruh persiapan agar kunjungan tersebut berjalan lancar dan sukses. "Selain membahas agenda kunjungan Megawati, pertemuan juga menyangkut upaya memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Timor Leste," ujar Hasto.

Kedua pihak menyoroti pentingnya kerja sama antarpantai politik, khususnya dalam penguatan kelembagaan partai dan pemerintahan sistem demokrasi.

Dalam diskusi tersebut, Ramos-Horta menyinggung kesamaan antara konsep Marhaen yang dikenal dalam tradisi politik PDIP dengan istilah Marhaen yang berkembang di Timor Leste. Marhaenisme merupakan

gagasan yang diperkenalkan Presiden pertama RI Soekarno sebagai simbol perjuangan rakyat kecil dan kelompok tertindas.

Menurut Hasto, Presiden Ramos-Horta menjelaskan bahwa Marhaen dalam bahasa Tetum merujuk pada rakyat jelata, petani, serta masyarakat asli Timor Leste. Kesamaan nilai tersebut dinilai menjadi salah satu titik temu dalam pandangan politik kedua bangsa.

Ramos-Horta juga menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkesinambungan. Pendidikan harus didukung pengalaman dan keterampilan agar mampu menghasilkan tenaga profesional yang kompeten. Karena itu, reformasi pendidikan nasional menjadi prioritas penting bagi pembangunan negara.

Presiden Timor Leste turut menjelaskan keberadaan Human Capital Development Fund yang dibentuk pada 2011 sebagai instrumen kebijakan untuk mendukung pelatihan dan program beasiswa guna meningkatkan kapasitas serta keterampilan masyarakat.

Usai pertemuan, Hasto menyerahkan cenderamata berupa kain batik kepada Presiden Ramos-Horta sebagai simbol persahabatan kedua negara.

Dalam kunjungan tersebut, Hasto didampingi Ketua DPP PDIP Bidang Organisasi Andreas H. Pareira, Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan PDIP Andi Widjajanto, serta Direktur Luar Negeri PDIP Hanjaya Setiawan. (rub)

PSI Klaim Agenda Jokowi Blusukan Tak Akan Jadi 'Matahari Kembar'

JAKARTA (Poskota) - Ketua DPP PSI Bidang Politik Bestari Barus menegaskan rencana kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke sejumlah daerah tidak bertujuan menciptakan "matahari kembar" dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Bestari, posisi PSI berbeda dengan partai-partai lain yang tergabung dalam koalisi pemerintahan. Saat ini, PSI justru hanya menjalani proses verifikasi faktual karena belum berhasil lolos ke parlemen pada Pemilu 2024.

"PSI ini adalah partai yang harus melalui terlebih dahulu

satu fase namanya verifikasi faktual. Karena partai kami ini belum masuk ke dalam parlemen. Sangat berbeda dengan partai-partai yang ada di koalisi itu karena mereka sudah berada di Senayan," kata Bestari, kemarin.

la menegaskan PSI tetap mendukung dukung pemerintah saat ini, apalagi penguat terhadap visi dan misi pemerintahan Prabowo-Gibran melalui kader-kadernya yang dipercaya mengisi posisi menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih.

Bestari mencontohkan kinerja Menteri Ketenatan Raja Juli Antoni yang merupakan kader PSI. Menurutnya, kementerian yang dipimpin Raja Juli berhasil

menyetorkan penerimaan negara dari hasil denda

tersebut justru perlu menjadi perhatian partai-partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

Ansy menilai partai koalisi perlu memastikan tujuan dari kegiatan yang dilakukan Jokowi sebagai pendukung program pemerintahan Presiden Prabowo atau semata-mata kepentingan pribadi.

"Hari ini kita tahu bahwa PRESIDENYU itu adalah Prabowo Subianto dan Presiden Prabowo itu ibarat matahari. Kalau dalam orkestrasi itu ibarat konduktor tunggal yang memimpin untuk menghasilkan sebuah harmoni yang sangat baik,"

kata Ansy. la juga mengingatkan seluruh partai politik pendukung pemerintah agar tetap fokus menyukseskan agenda kerja Presiden Prabowo dan tidak menjalankan agenda masing-masing yang berpotensi mengguncang konsolidasi pemerintahan.

"Tidak boleh ada matahari yang lebih dari satu. Semuanya harus fokus. Kita bisa bayangkan kalau ada sepuluh partai pendukung pemerintah dan masing-masing partai punya agenda. Kita bisa pastikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini pasti tidak akan berhasil," ujarnya. (rub)

Putusan MK soal Keterwakilan Kuota Perempuan Berikan Keadilan Gender

JAKARTA (Poskota) - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat keadilan gender dan meningkatkan peran perempuan dalam dunia politik.

Dalam putusan Nomor 128/PUU-XVII/2026 yang diterbitkan pada 25 Mei 2026, MK menegaskan bahwa partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dapat dicoret atau digugurkan keikutsertaannya pada daerah pemilihan (dapil) terkait.

Direktur Eksekutif Laboratorium Politik dan Kebijakan MHZ Centre, Muhammad Riza Zulkarnain, menyambut baik putusan ini, terutama karena memberikan peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan legislatif, khususnya

pada penyusunan Daftar Calon Resmi Pemilihan Umum (DCRPU) sebagai syarat administratif tanpa komitmen nyata untuk memberikan ruang politik yang setara.

"Keseriusan partai politik dalam mewujudkan keadilan gender selama ini masih setengah hati. Praktik patriarki dan anggapan bahwa politik merupakan ruang yang maskulin masih cukup kuat. Karena itu, perempuan perlu diberikan kesempatan dan ruang yang lebih luas dalam berbagai bidang, termasuk politik," ujar Harris dalam keterangan persnya, kemarin.

la menilai putusan MK akan mendorong partai politik lebih serius dalam merekrut dan mengunggulkan kader perempuan sebagai calon legislatif. Selama ini, kata dia, masih ditemukan partai politik yang lolos verifikasi maupun penetapan DCRPU meski tidak memenuhi ketentuan kuota perempuan.

"Dengan adanya putusan ini, partai politik diharapkan tidak lagi memandang keterwakilan perem-

puan sebagai formalitas, melainkan sebagai bagian penting dari demokrasi yang inklusif," katanya.

Harris menegaskan putusan MK bersifat mengikat dan wajib dipatuhi seluruh pihak. la juga meminta substansi putusan tersebut diimplementasikan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini tengah dibahas. Menurut dia, keberadaan sanksi yang tegas sangat diperlukan agar aturan mengenai keterwakilan perempuan tidak hanya menjadi norma di atas kertas.

"Tanpa sanksi yang kuat, ketentuan kuota perempuan berpotensi kembali dianggap sebagai formalitas. Karena itu, mekanisme pencoretan peserta pemilu menjadi instrumen penting untuk memastikan kepatuhan partai politik," ujarnya.

Selain itu, Harris mengapresiasi upaya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat penegakan hukum. Ia berharap putusan ini dapat mendorong perubahan pola pikir masyarakat yang memandang perempuan sebagai objek, bukan subjek. "Langkah tersebut penting untuk menjaga integritas partai politik sekaligus menekan praktik korupsi politik. Partai harus bertanggung jawab terhadap kader yang diberi mandat untuk menduduki jabatan publik," pungkasnya. (rub)